



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT  
KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang : 2018-2019  
Masa Persidangan : V  
Rapat ke- : 7 (Tujuh)  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Dengan : Sekjen BPK RI, BPS, BPKP dan LKPP  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Rabu, 19 Juni 2019  
Waktu : 13.00 WIB.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI  
Ketua Rapat : Ir. H. Achmad Hafisz Tohir  
Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono  
Acara : Pembahasan RKA/KL Tahun 2020  
Hadir Pemerintah : 1. SEKJEN BPK RI/HENDAR RISTRIAWAN  
2. KEPALA BPS/DR. SUHARIYANTO  
3. Plt. KEPALA BPKP/ISWAN ELMI  
4. KEPALA LKPP/DR. IR. RONI DWI SUSANTO,  
M.Si.

## **JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR/F-PAN):**

*Bismillahirrohmanirrohim.*

*Assalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera bagi kita semua.**

*Ohm Swastiastu.*

*Namo Budaya.*

**Yang kami hormati Saudara Sekretaris Jenderal BPR RI beserta jajarannya.**

**Yang kami hormati juga Saudara Kepala BPS beserta jajarannya.**

**Yang kami hormati Saudara Kepala LKPP beserta jajarannya.**

**Yang kami hormati seluruh Anggota Komisi XI DPR RI yang hadir pada siang hari ini serta hadirin hadirat yang berbahagia.**

Catatan dari Sekretariat, daftar hadir rapat telah ditandatangani oleh 13 Anggota dari 52 Anggota yang terdiri atas 9 fraksi dari 10 fraksi. Sesuai ketentuan Pasal 251 Ayat 1 Peraturan Tata-Tertib DPR maka ijin kami membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Sekretariat Jenderal BPK, Kepala BPS, Kepala BPKP dan Kepala LKPP. Dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Setuju ya?

### **(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB)**

Para hadirin yang kami hormati mengawali rapat ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnyalah kita dapat menghadiri rapat ini dalam keadaan sehat wal afiat tidak kurang sesuatu apapun. Semoga nanti yang kita bicarakan dan simpulkan pada rapat ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Karena masih dalam suasana Syawal maka ijin saya mewakili seluruh Anggota dan Pimpinan Komisi XI DPR RI mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1440 Hijriyah, mohon maaf lahir dan batin apabila dalam interaksi kami selama ini terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dan semoga kita benar-benar menjadi pribadi yang kembali menuju fitri.

Bapak Ibu sekalian yang kami hormati agenda kita pada hari ini adalah pembahasan pagu indikatif BPK RI, BPKP, BPS dan LKPP dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2020. Sebagaimana kita ketahui bersama pemerintah telah menyampaikan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2020 kepada DPR RI, dimana didalam KEM-PPKF tahun 2020 tersebut diuraikan kebijakan umum dan prioritas serta pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga. Alokasi pagu indikatif untuk BPK RI, BPS, BPKP dan LKPP adalah sebagai berikut:

1. Pagu indikatif BPR RI tahun 2020 adalah sebesar Rp.3.337.700.000.000,- yang akan digunakan untuk program dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp.704.700.000.000,-. Dan program pemeriksaan keuangan negara sebesar Rp.2.633.000.000.000,-.

2. Pagu indikatif BPS adalah sebesar Rp.7.928.800.000.000,- yang akan digunakan untuk program dukungan management dalam pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS sebesar Rp.2.963.300.000.000,-. Dan program penyediaan pelayanan informasi statistik sebesar Rp.4.965.500.000.000,-.
3. Pagu indikatif BPKP tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.853.700.000.000,- yang akan digunakan untuk program dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP sebesar Rp.1.647.700.000.000,- dan program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah sebesar Rp.206.000.000.000,-.
4. Pagu indikatif LKPP adalah sebesar Rp.169.700.000.000,- yang akan digunakan untuk program dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya LKPP sebesar Rp.80.800.000.000,- dan program pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sebesar Rp.88.900.000.000,-.

Terkait dengan pagu indikatif tersebut Komisi XI ingin mendapatkan informasi yang lebih rinci terkait program yang akan dilaksanakan serta output dan outcome yang diharapkan dari program yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu maka kami persilakan kepada Saudaraku Sekjen BPK RI untuk memulai paparannya, kemudian disambut dengan Kepala BPS, Kepala BPKP dan Kepala LKPP setelah itu.

Demikian hal ini kami sampaikan waktu dan tempat kami persilakan.

#### **SEKJEN BPK RI:**

**Terima kasih Pimpinan.**

*Assalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang terhormat Pimpinan Komisi XI,**

**Yang terhormat Anggota Komisi XI,**

**Yang terhormat Kepala BPS, Kepala LKPP dan Kepala BPKP yang sementara ini masih diwakili oleh Sestama BPKP beserta seluruh jajaran dan rekan-rekan para pejabat eselon satu Badan Pemeriksa Keuangan serta hadirin yang saya muliakan.**

Perkenankan kami menyampaikan pembahasan RKA BPK pagu indikatif dalam RAPBN tahun 2020 dengan beberapa agenda. Yang pertama kami akan menyampaikan secara sekilas mengenai tugas wewenang BPK kemudian hasil dan manfaat BPK, kemudian RKA BPK tahun 2020 dan penutup.

Secara sekilas tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan hasil pemeriksaannya disampaikan kepada lembaga perwakilan serta kepada Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk ditindaklanjuti. Dan juga BPK bertugas untuk melaporkan unsur pidana yang ditemukan didalam pemeriksaan untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang. Dan tugas yang terakhir BPK adalah memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil tindak lanjut pemantauan tindak lanjut tersebut secara tertulis kepada lembaga perwakilan

dalam hal ini DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Kemudian BPK sampai dengan tahun 2020 ini memiliki visi untuk mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat sehingga BPK memiliki dua tujuan strategis dalam kaitan dengan penyusunan kegiatannya yaitu, pertama meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan, dan kedua meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara mencapai tujuan negara. Dengan dua tujuan strategis tersebut kami juga ingin menginformasikan mengenai manfaat hasil pemeriksaan BPK sampai dengan 2018 ini. Dari segi jumlah laporan hasil pemeriksaan mengalami kenaikan dari tahun 2017. Kemudian kualitas laporan keuangan pemerintah pusat berdasarkan hasil pemeriksaan BPK meningkat secara signifikan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di pusat maupun di daerah semakin baik. Demikian juga kami menyampaikan peningkatan juga hasil pemeriksaan investigatif penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli (PKA) dan nilai atau hasil dari pemeriksaan tersebut bisa dilihat didalam slide dalam paparan. Demikian juga didalam tindak lanjut hasil pemeriksaan mengalami peningkatan sampai ke level 60 persen lebih dari tahun-tahun sebelumnya sehingga hasil pemeriksaan BPK semakin ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang kami hormati serta hadirin yang kami muliakan. Perkenankan kami juga untuk menyampaikan pagu dan realisasi BPK tahun 2016 sampai tahun 2018 untuk program-program pemeriksaan BPK dari apa namanya program nol tiga, nol enam dan nol tujuh. Demikian juga kenaikan program nol satu dukungan management dan juga kenaikan program nol delapan yaitu untuk pemeriksaan pengelolaan keuangan negara yang secara berangsur-angsur ada peningkatan dan juga sekaligus ada penurunan di program dukungan management. Kemudian kami perlu sampaikan pada slide berikutnya kinerja anggaran BPK *Alkhamdulillah* BPK mendapatkan hasil asesment dari sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu dari Kementerian Keuangan dengan predikat sangat baik. Demikian juga dari evaluasi kinerja anggaran dan juga untuk indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Dan ini *Alkhamdulillah* capaian nilai BPK cukup sangat baik dari hasil asesment yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian kami juga ingin sampaikan kinerja BPK yang lain terkait dengan prosentase gugatan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dari pihak-pihak lain yang tidak puas dengan hasil pemeriksaan BPK. Seluruhnya BPK memenangkan tuntutan tersebut di pengadilan. Jadi tidak ada hasil pemeriksaan yang kalah di pengadilan, sehingga seratus persen hasil pemeriksaan BPK dimenangkan dari gugatan para pihak di pengadilan. Kemudian nilai kualitas reformasi birokrasi kami memperoleh A sejak tahun 2016. Demikian juga nilai akuntabilitas kinerja tiga tahun terakhir dari Kemenpan RB kami memperoleh A. Dan opini laporan keuangan BPK dari Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan oleh DPR kami memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dalam tiga tahun terakhir ini. Demikian juga kami memperoleh penghargaan *Obsation Award* sebagai *Best Aciver In Sate Institution*, *Prokrument Award* dari Kementerian Keuangan dan juga *Publik Relation Indonesia Award* dari lembaga negara terpopuler dan kami juga *Alkhamdulillah* telah memperoleh wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi

bersih dan melayani untuk perwakilan-perwakilan BPK. Kemudian di tingkat international BPK menjadi eksternal auditor juga untuk International Anti Corruption Akademi di Austria kami ditunjuk salah satu auditor BPK menjadi eksternal auditor IACA. Untuk lembaga BPK menjadi eksternal auditor international atau *mic energi agency* sampai terakhir keputusan terakhir dari IAEA sampai 2021. Dan kami memperoleh PNPB dari jasa audit IAEA ini. Demikian juga BPK sebagai ketua dan sekretariat dari *International Organisation Of Supreme Audit Institution* atau organisasi BPK sedunia khususnya *working group infarmental auditing* untuk pemeriksaan lingkungan dan juga sebagai pengurus *Asean Organisation Of Supreme Audit Institution (ASOSAI)* sampai dengan tahun 2021.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang terhormat, untuk pagu indikatif BPK 2020 sebagaimana tadi disampaikan oleh Pimpinan ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 3,3 triliun, atau tiga triliun tepatnya 337,73 milyar terdiri dari program dukungan management 704,7 milyar dan program pemeriksaan keuangan negara 2,633 triliun. Kemudian kami melakukan pergeseraan pagu antar program dengan meningkatkan program pemeriksaan keuangan negara menjadi 2,7 dan mengurangi program dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPK turun menjadi 617,32 milyar. Pada slide berikutnya kami ingin menyampaikan pagu indikatif tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 secara jumlah anggaran pagu indikatif BPK meningkat dari 2,95 triliun menjadi 3,33 triliun. Namun secara rincian belanja baik belanja khususnya belanja non operasional mengalami penurunan sebesar 526,90 milyar. Dan penurunan ini terjadi kepada belanja non operasional khususnya untuk belanja pemeriksaan biaya pemeriksaan. Sehingga nanti kami akan sampaikan dampak dari penurunan ini terhadap jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tahun 2020. Kenaikan di belanja operasional ini disebabkan adanya penyempurnaan atau penyesuaian tunjangan pejabat tertentu yang ditetapkan oleh Presiden, sehingga belanja operasional khususnya belanja pegawai mengalami peningkatan sehingga peningkatan pagu anggaran ini lebih banyak disebabkan oleh peningkatan dari belanja operasional khususnya belanja pegawai. Sementara untuk belanja non operasional itu mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 526 milyar. Pada slide berikutnya kami ingin menyampaikan bahwa dampak penurunan pagu indikatif tahun 2020 dari usulan BPK. Usulan BPK 4,4 triliun ditargetkan output laporan hasil pemeriksaannya sebanyak 4.246 laporan hasil pemeriksaan. Kemudian dengan penetapan pagu anggaran maka alokasi untuk belanja non operasional khususnya biaya pemeriksaan hanya mampu dialokasikan untuk 785 laporan hasil pemeriksaan. Sehingga pemeriksaan yang tidak dapat dilaksanakan atau output LHP yang tidak dapat dilaksanakan adalah 3.461 LHP. Ini cukup signifikan khususnya nanti ada 195 pemeriksaan kinerja, 372 pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) dan juga amanat undang-undang untuk pemeriksaan bantuan Parpol sebanyak 2.894 pemeriksaan bantuan Parpol yang belum dialokasikan anggaran untuk tahun 2020.

Dengan demikian kekurangan anggaran ini sangat mengganggu pelaksanaan tugas BPK untuk memenuhi amanat undang-undang serta meningkatkan mutu pemeriksaan BPK. Kemudian dari sisi kerangka apa namanya, lanjut saja yang tadi sudah disampaikan. Berikutnya rencana

kegiatan BPK tahun 2020. Dengan alokasi yang ada untuk kegiatan dukungan management kami mencoba mengalokasikan dari pagu yang ada. Pertama untuk peningkatan komunikasi antara BPK dengan para pemangku kepentingan dengan anggaran 109,51 milyar atau hampir 17,7 persen. Kemudian juga untuk dukungan teknologi informasi 34,75 persen atau 5,63 persen dari total anggaran yang ada untuk dukungan management. Dan juga untuk peningkatan pengelolaan sumberdaya manusia melalui pengembangan sistem merit itu 323,31 milyar atau 52 persen. Dan peningkatan efektifitas pengelolaan sarana prasarana 129,97 milyar atau 21 persen dan pengoptimalan manfaat anggaran 19,78 persen atau eh milyar maaf, kemudian atau 3,21 persen. Sementara untuk program nol delapan pemeriksaan keuangan negara dari 2,7 triliun dari alokasi pagu anggaran saat ini kami gunakan atau alokasikan untuk pemeriksaan BPK berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan BPK sebesar 2,6 triliun atau 95,7 persen. Dan untuk pelaksanaan pengawasan terintegrasi sebesar 10 milyar. Dan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Diklat pemeriksaan sebesar 87,38 milyar atau 0,24 persen. Dan peningkatan layanan legislasi pengembangan dan bantuan hukum serta layanan konsultasi hukum serta kepaniteraan sebesar 6,58 persen, eh 6,58 milyar maaf atau 0,45 persen. Dan melakukan penyusunan perencanaan evaluasi hasil pemeriksaan serta pendirian pengembangan sebesar 12,36 milyar atau 0,45 persen dari alokasi pagu indikatif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah kami melakukan pergeseran. Kemudian kami dalam kesempatan yang baik ini

#### **F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):**

Pimpinan, interupsi Pimpinan. Pak Sekjen, Bapak-Bapak yang hadir dari BPS, BPKP, LKPP dan yang mendampingi. Ini menarik ini tadi yang disampaikan. Saya melihat ada keanehan ya. Kan ini gini, semakin tahun apalagi kemarin kami baru saja membahas soal pertumbuhan pemerintah mengusulkan antar 5,3 sampai 5,6. Artinya ada peningkatan anggaran APBN lagi yang akan dilakukan. Tapi satu sisi anggaran yang kaitan dengan pemeriksaan kok turun, ini kan paradok, ini ngga bisa begini. Bagaimana mungkin nanti proyek semakin banyak, kegiatan aktifitas keuangan ini semakin besar tapi pengawasan semakin dikurangi. Tadi sudah nyerah saya dengar Pak Sekjen. Kalau ini tidak bisa yang ini kami ngga bisa lakukan, dan kita ngga bisa biarkan itu kalau menurut saya. Jadi Pak Sekjen kami minta juga Bapak memaparkan berapa sih seharusnya supaya BPK itu maksimal, dipaparkan juga Pak. Jadi ini bisa bahan kami berdiskusi sama pemerintah melalui Menteri Keuangan.

Saya rasa itu Pimpinan terima kasih.

#### **SEKJEN BPK:**

Terima kasih Pimpinan dan terima kasih Pak Jon Erizal. Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Jon Erizal kami juga mengusulkan Pak tambahan anggaran untuk pemeriksaan sebanyak 3.461 yang tadi tidak teralokasikan anggaran dengan pemotongan pagu anggaran belanja non operasional kami

mengusulkan untuk ditambah 572,31 milyar untuk 3.461 output pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan yang belum tersedia anggarannya. Disamping itu kami juga mengusulkan peningkatan kapabilitas badan Diklat sebesar 95,64 milyar. Dan badan Diklat ini baru disetujui oleh Menpan menjadi unit eselon satu tahun 2018 yang lalu tetapi anggarannya belum ditingkatkan, sehingga peningkatan kapasitas badan Diklat ini kami mengusulkan juga untuk ditambahkan dalam anggaran 2020 sebesar 95,64 milyar. Kemudian kami juga mengusulkan tambahan 336,01 milyar untuk perbaikan *mobile working and fairman* Pak, karena kami sekarang sedang menerapkan sarana prasarana ruang kerja yang sifatnya sharing desharing.

Jadi karena penambahan jumlah pegawai sementara kapasitas gedung terbatas kami mengubah kubikal menjadi desharing sehingga ada perubahan layout dan seterusnya untuk kantor pusat dan seluruh kantor perwakilan, serta kami juga membangun laboratorium forensik untuk dukungan pemeriksaan investigatif penghitungan kerugian negara yang diminta oleh instansi yang berwenang sehingga kami membutuhkan tambahan 336,01 untuk pembangunan sarana prasarana tersebut. Demikian juga untuk peningkatan kapasitas SDM melalui program beasiswa dan penerapan jabatan fungsional pemeriksa. Dan sampai sekarang tunjangan jabatan pemeriksa ini belum ada kami mengusulkan tambahan anggaran 20,68 milyar untuk SDM. Untuk kegiatan kerjasama internasional dengan adanya tadi apa namanya peran BPK di lembaga internasional kami mohon tambahan 31,08 milyar. Kemudian yang terakhir untuk pengembangan dan pembinaan hukum kami mengajukan tambahan 4,34 milyar. Sehingga secara total kami mengajukan usulan tambahan 1 triliun 60 milyar. Termasuk yang paling besar adalah untuk pemeriksaan 572 milyar. Demikian Pimpinan dan ini paparan kami terakhir mohon dukungan dan arahan dari Pimpinan dan Anggota Komisi XI.

Demikian kuranglebihnya mohon maaf, *billahitaufikwalhidayah Wassalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Ijin Pimpinan, interupsi sedikit sebelum lanjut.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Pak Sekjen pada saat penurunan apa pagu indikatif itu apakah dari BPK juga dilibatkan oleh apa ya di Bappenas itu apa yang melaksanakan, deputy? dan DJA kan Direktorat Jenderal Anggaran itu apakah BPK juga dilibatkan sehingga akhirnya BPK oke sehingga muncul angka ini ke kami. Apa memang BPK sudah mengatakan kami ngga bisa karena kan percuma pagu indikatif dikurangi toh akhirnya BPK kemari untuk mendapatkan usulan tambahan satu triliun lagi. Karena kan tidak mungkin Pak auditor ditahan untuk tidak memeriksa gitu ya, apalagi jumlahnya cukup signifikan tadi.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan dijawab interupsinya.

**SEKJEN BPK RI:**

Terima kasih Pimpinan dan, eh terkait pembahasan anggaran dalam proses penyusunan pagu indikatif sebenarnya kami mengajukan 4,4 triliun Bu. Kemudian ada pembahasan trilateral dan kami sudah pembahasan dengan Bappenas dan juga dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan kami tetap mengajukan 4,4 triliun. Namun demikian akhirnya keluar pagu indikatif 3,33 yang ini akhirnya kami berusaha untuk mengalokasikan dan dampaknya tadi 3.400 pemeriksaan tidak bisa dilaksanakan. Dengan demikian semester dua dan kami memprioritaskan dengan anggaran yang ada hanya untuk pemeriksaan laporan keuangan di semester satu, sehingga semester dua untuk pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan investigatif kami tidak ada anggarannya untuk tahun 2020. Dengan demikian semester dua tidak ada pemeriksaan kemungkinan.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Ijin lagi Pimpinan mumpung disini menarik. Padahal kemarin Bappenas Menteri Bappenas menyampaikan bahwa Bappenas itu konstrennya kepada yang prioritas Pak. Lah bagaimana pemeriksaan dianggap tidak prioritas meskipun angka-angka itu ada di DJA. Kemudian Bappenas itu kepada fungsi, termasuk kan ini apa pemeriksaan. Nah kalau sampai lolos begini dan akhirnya dari 4,4 menjadi 3 koma dan akhirnya akan ditambah lagi 1,60 akhirnya kan juga empat juga gitu, kan percuma artinya untuk apa. Ini kan membuang waktu energi yang akhirnya kami juga jadi dibingungkan dalam hal ini Komisi XI.

**KETUA RAPAT:**

Ya saya kira nanti kita masukan saja ya Bu ya. Ya memang agak lucu juga kalau saya lihat ada tujuh lembaga tinggi negara ya salah satunya adalah BPK, dan salah duanya adalah DPR, itu mengalami nasib yang sama. Kalau saya lihat prosentasenya tadi hanya 25 persen pemeriksaan yang bisa berjalan. Bagaimana satu-satunya lembaga auditor yang ditunjuk oleh Undang-Undang Dasar, bukan undang-undang, Undang-Undang Dasar 45 sebagai auditor resmi negara tapi anggarannya dipotong. Ini perlu kita pikirkan nanti.

Baik kita lanjutkan kepada BPS, habis itu BPKP ya.

**KEPALA BPS:**

**Terima kasih Pimpinan.**

*Assalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang terhormat Pimpinan, Wakil Pimpinan, Bapak Ibu Anggota DPR RI**



## **Komisi XI, Sekjen BPK, Kepala BPKP dan Kepala LKPP beserta seluruh jajaran.**

Sebelum saya menyampaikan anggaran tahun 2020 iijinkan saya untuk menyampaikan beberapa capaian kinerja BPS selama tahun 2019. Yang pertama dari sisi akuntabilitas BPS pada tahun ini memperoleh penghargaan hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan juga mendapat penghargaan sebagai salah satu instansi yang hemat energi. Kemudian dari laporan keuangan tahun 2018 ini BPS kembali mendapatkan WTP. Tentunya ini tercapai karena banyaknya masukan dari BPK dan juga pendampingan dari BPKP dan LKPP. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dari teman-teman BPK, BPKP dan LKPP. Hasil penilaian dari Menpan saat ini kita predikatnya masih BB sementara indeks reformasi birokrasinya juga mengalami peningkatan. Tahun 2019 ini kita targetkan 78,5. Untuk memenuhi permintaan para pengguna data banyak pengembangan rekam data yang kita lakukan. Yang pertama adalah terkait berbagai indikator SDGES yang jumlahnya besar sekali. Yang mulai dilakukan adalah membentuk sistem neraca ekonomi lingkungan, karena kita ingin membangkitkan kesadaran bahwa pembangunan tidak semata-mata hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi tetapi kita harus betul-betul memperhatikan lingkungan. Kemudian pada tahun ini Presiden juga minta khusus pengumpulan data mengenai stanting atau anak kerdil karena nanti pengaruhnya ke pertumbuhan akan luar biasa dan BPS bersama Bappenas sudah membikin target sampai dengan kabupaten.

Bersama Dekraf kita membuat statistik ekonomi kreatif, dan kemarin sesuai permintaan dari Pak Andreas Komisi XI mulai tahu ini kita menyusun intereregional input output E-Riau dan juga menggunakan aplik data salah satunya adalah mobile found data. Di sisi internasional pada tahun ini Komisi Statistik PBB membentuk yang namanya *Friend of Cher fox future of economic statistik*. Jadi dari seluruh negara dipilih sepuluh Kepala BPS dan Indonesia termasuk salah satu diantaranya bersama sepuluh ekonom dari berbagai negara. BPS juga akan menjadi tuan rumah untuk berbagai work shop internasional, minggu lalu misalnya ada work shop mengenai penggunaan mobile found data. Ini dalam rangka menyesuaikan dengan tujuan dari Kemenlu dimana kita perlu menggandeng teman-teman negara lain terutam dari Aisa Pasifik dalam kerangka *south south cooperation*. Dan data pertumbuhan ekonomi dari IMF kita masih mendapatkan posisi akurat. Untuk pagu dan realisasi tahun 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 realisasi kita dari total anggaran 5,2 triliun adalah sebesar 40,61 persen. Disana kalau dilihat menurut program memang masih ada yang agak kecil untuk PPAA. Disini agak kecil sebesar 26,68 persen karena memang selama dua bulan terakhir ini BPS berusaha menyelesaikan berbagai saran dari BPK dan baru akan kita lakukan untuk internalnya mulai bulan depan. Tetapi dengan melihat perkembangannya saya yakin bahwa sampai dengan akhir tahun realisasi anggaran BPS pada tahun ini akan lebih bagus. Dari baberapa data yang akan dihasilkan kemarin sudah kita sampaikan data mengenai asumsi makro, dari pertumbuhan ekonomi, inflasi sampai dengan target pembangunan. Tetapi salah satu data yang baru misalnya adalah indeks pembangunan desa 2018 dimana dari indeks pembangunan desa ini sangat bermanfaat untuk melihat perkembangan desa. Misalnya tahun 2018 kita meskipun ada pergerakan

jumlah desa mandiri tetapi kita masih punya PR mengenai jumlah desa tertinggal yang sebesar 19,17 persen. Dalam hal ini identifikasi desa ini kita bekerjasama dengan Bappenas dan Kemendes. Mudah-mudahan dengan identifikasi dan terobosan yang lebih spesifik desa-desa tertinggal ini nantinya akan bergerak menuju ke desa berkembang dan mudah-mudahan menjadi desa mandiri.

Untuk tahun 2020 seluruh kegiatan BPS akan mengacu kepada RKP tahun 2020 dimana tema yang diangkat adalah peningkatan sumberdaya manusia untuk pertumbuhan berkualitas. Kemarin sudah disampaikan di Komisi XI mengenai lima prioritas nasional dan berbagai kegiatan BPS akan mengacu kesana, misalnya untuk program nasional nomor satu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Disana program prioritasnya adalah perlindungan sosial dan tatakelola kependudukan, dimana BPS akan menuju pengembangan satu data kependudukan lewat sensus penduduk tahun 2020. Jadi nanti tahun depan BPS bersama hampir separoh negara di dunia harus melakukan sensus penduduk 2020 dengan cakupan seluruh Indonesia. Kemudian misalnya lagi untuk prioritas nasional nomor tiga disana untuk peningkatan nilai tambah ekonomi sektor riil industrialisasi dan kesempatan kerja. Proyek prioritasnya adalah pengembangan statistik pariwisata dan statistik icomes yang mempunyai perkembangan yang sangat pesat dan harus segera diperhitungkan didalam menghitung berbagai indikator. Untuk sensus penduduk 2020 tema yang akan kita angkat adalah menuju satu data kependudukan. Sensus penduduk 2020 ini akan berbeda dengan sensus penduduk sebelumnya. Jadi pada sensus penduduk tahun 2020 ini untuk pertama kalinya kita akan bekerjasama dengan Kemendagri dimana kita akan menggunakan data E-KTP dari Dukcapil sebagai basis, sehingga data kependudukan di Indonesia akan menjadi satu. Dan data yang ada di Dukcapil akan terupdate terutama mengenai status pendidikan, lapangan pekerjaan, tempat tinggal yang kadang-kadang berbeda antara de facto dan de jurel. Juga didalam pelaksanaannya kita akan lakukan pendekatan dengan tiga. Yang pertama kita minta patisipasi dari masyarakat untuk mengupdate dirinya sendiri supaya data kependudukannya lebih terupdate dari waktu ke waktu itu nanti lewat .... Kita sudah membuat gladi bersihnya di Kulonprogo, dan saya kira respon dari masyarakat lumayan bagus. Selain itu pendataan di BPS nanti tidak hanya mengandalkan hard copy tetapi juga akan menggunakan tablet atau KP.

Jadi ini merupakan metode kombinasi yang pertama kali dilakukan tentunya banyak masalah yang dihadapi, tetapi saya yakin dengan koordinasi yang bagus antara BPS, Kemendagri dan seluruh stakeholder lainnya Insha Allah akan berjalan mulus. Dari hasil SP 2020 nanti tentunya data utama yang kita peroleh adalah mengenai jumlah penduduk, komposisi, distribusi dan karakteristik. Hasil dari data sensus penduduk ini nanti akan sangat bermanfaat untuk perencanaan di berbagai sektor. Misalnya saya ambil contoh memanfaatkan hasil sensus penduduk untuk proyeksi penduduk. Jadi proyeksi penduduk ini yang paling sering didiskusikan di berbagai media masa maupun di dunia penelitian. Dari sana misalnya diketahui bahwa jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2045 ini dicantumkan didalam visi 2045 Indonesia. Terlihat disana bahwa jumlah penduduknya akan bergerak dari 267 juta menjadi 319 juta. Jumlah yang sangat besar ini nanti tentunya akan berpengaruh besar kepada pangan, kebutuhan pangan, kebutuhan sekolah,

pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kemudian dari sana kita juga bisa melihat terjadinya bonus demografi yang ternyata berakhirnya lebih cepat pada tahun 2036.

Satu lagi masalah kritis yang saya ingin minta dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu Komisi XI adalah jumlah Manula yang pada tahun 2045 itu adalah tiga kali lipat. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang situasinya bisa kurang menyenangkan. Karena itu kita dengan Bappenas berusaha untuk memberikan warning ini sedini mungkin. Pada tahun 2020 alokasi anggaran yang diberikan oleh BPS lewat Permen ah surat edaran bersama dari Menkeu dan Kepala Bappenas adalah 7,92 triliun. Pada tahun 2020 tiga program akan kita satukan supaya lebih fleksibel, dimana di EMPTLnya adalah sebesar 2,96 triliun. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan pagu indikatif tahun 2020 di BPS mengalami peningkatan 52,13 persen. Itu lebih utama karena untuk kebutuhan sensus penduduk 2020. Yang bisa dilihat disana bahwa pagu pengumpulan data dari total 4,9 triliun untuk sensus penduduknya sendiri akan menelan biaya 4,034 triliun atau 81,25 persen. Sementara untuk prioritas nasional kedua seperti penyusunan interregional input output itu menelan biaya 40,28 milyar dan seterusnya. Jadi anggaran yang terbesar adalah untuk sensus penduduk 2020, dimana sensus penduduk 2020 ini akan kita lakukan mulai bulan Maret 2020 itu hanya questioner yang pendek yang jumlah variabel yang dicakup sekitar 22 pertanyaan.

Tetapi sesudah itu akan kita ambil sampel di tahun 2021 dan akan mencakup 90 pertanyaan kembali tujuan utamanya adalah menuju satu data kependudukan akan bagus sehingga data Dukcapil juga akan terupdate terutama untuk daerah wilayah timur seperti di Papua, Papua Barat, Maluku dan Sulawesi Barat yang menurut Dukcapil sendiri kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Dari total anggaran sebesar 4 triliun 88 persennya akan digunakan untuk pelaksanaan lapangan dimana kita akan membutuhkan petugas. Kita akan membuka lowongan petugas sensus secara terbuka baik lewat online, instagram maupun facebook. Untuk petugas lapangan itu nanti kita akan membutuhkan petugas dalam jumlah yang banyak. Pencacahnya saja kita akan membutuhkan sekitar 320 ribu orang. Jadi disana nanti untuk pelaksanaan sensus mulai dari pelatihan dan sebagainya akan menelan biaya 88,97 persen dari total 4,03 triliun. Sementara sisanya adalah untuk pengolahan, untuk penjaminan kualitas, publisitas dan sebagainya.

Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Pimpinan, BPS selalu menerima masukan dan kita minta dukungan dari Komisi XI supaya anggaran ini bisa digunakan semakin baik. Dan masukan dari Bapak-Bapak Ibu Komisi XI akan terus kita perhatikan supaya kinerja BPS kedepan semakin membaik.

Terima kasih.

*Wassalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik setelah BPS kita lanjut ke BPKP, silakan.

## **KEPALA BPKP:**

### **Terima kasih.**

*Assalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Selamat sore salam sejahtera bagi kita semua.**

Mohon perkenan yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI sementara kami mewakili Pak Kepala karena ada rapat terbatas. Ijin untuk melanjutkan Pak Pimpinan, terima kasih Pak.

Baik kami mencoba memaparkan beberapa hal terkait dengan usulan pagu indikatif 2020. Pertama mengenai tugas dan fungsi BPKP, kedua disain prioritas kegiatan pengawasan 2020 serta realisasi anggaran dan output yang sudah dicapai tahun 2019 serta pengajuan pagu indikatif dan target output tahun 2020 serta hasil pengawasan 2019. Tugas dan fungsi BPKP kami memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara dan daerah dan pembangunan nasional dengan fungsi antara lain pertama melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara meliputi kegiatan lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara dan kegiatan lain berdasarkan penugasan oleh Presiden. Kedua melakukan review atas laporan keuangan pemerintah pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden. Ketiga meningkatkan kapasitas pengawasan intern dan keempat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Disain prioritas kegiatan pengawasan 2020 kami rancang sebagai berikut.

Indikator kinerja utama yang kami coba usulkan adalah ada tiga, yang pertama peningkatan mayoritas SPP terkait dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, peningkatan kapabilitas APIP terkait dengan kapasitas pengawasan intern dan ketiga peningkatan indeks akuntabilitas program prioritas pembangunan nasional (AP3N) yang terkait dengan program lintas sektoral. Fokus atau strategi pengawasan kami fokuskan pertama pengawalan pembangunan nasional. Yang kedua peningkatan ruang fiskal, yang ketiga pengamanan aset negara atau daerah dan keempat peningkatan governance sistem. Berdasarkan prioritas urgensi yang kami perhatikan pertimbangkan pertama mengenai mandat peraturan perundang-undangan, yang kedua instruksi atau arahan Presiden baik langsung maupun tidak langsung serta penugasan pemerintah lainnya. Kami melaksanakan tugas berdasarkan dua kegiatan besar. Pertama terkait dengan asurans melalui kegiatan audit, evaluasi, review, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta kegiatan-kegiatan arfaisari yang mencakup Asistensi, Bimtek, Workshop, Diklat, pengkajian dan pengembangan dengan memperhatikan lima prioritas nasional yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Ijin menyampaikan realisasi anggaran dan output tahun 2019 hingga saat ini. Total per 14 Juni 2019 realisasi anggaran yang sudah kami laksanakan secara keseluruhan senilai 667 milyar dari 1,5 triliun sehingga terealisasikan 44 persen. Terdiri dari per jenis belanja pegawai 48 persen, belanja barang 37 persen dan belanja modal 51 persen. Sedangkan per program dukungan management sudah 47 persen dan pengawasan 37 persen. Dari target dan realisasi output tahun 2019 sampai dengan 14 Juni 2019 kami sudah merealisasikan 3.373 total target output atau sekitar 35,21 persen. Dengan

empat fokus pengawasan tadi kami merealisasikan untuk pengawalan pembangunan nasional sekitar 37,96 persen, untuk peningkatan ruang fiskal 20,77 persen, untuk peningkatan tatakelola 35,56 persen dan untuk pengamanan aset negara dan daerah sekitar 29,04 persen.

Ijin melanjutkan untuk pagu indikatif dan target output tahun 2020. Pagu indikatif tahun 2020 mungkin ijin menyampaikan juga penjelasan Bapak Ibu sekalian Pimpinan yang kami hormati. Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan Nomor 338/MK/2/2019 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B24/1/2019 tentang pagu indikatif belanja KL tahun anggaran 2020 kami tindaklanjuti itu yang berdasarkan surat sudah sesuai dengan yang dibacakan oleh Pimpinan rapat tadi. Kemudian kami mencermati diikuti dengan penelaahan di trilateral meeting. Nah kami setelah mempertimbangkan ijin Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi XI, menurut kami memang untuk biaya pengawasan ini masih kurang, sehingga kami mengusulkan untuk realokasi Bapak Ibu jadi bukan meminta tambahan anggaran hanya merealokasi dari anggaran yang tersedia. Sehingga pagu anggaran 2020 yang kami usulkan menjadi sebagai berikut. Untuk program nol satu untuk mata anggaran atau pos lima puluh satu total pagu indikatif yang kami usulkan 1 triliun 31 milyar, kemudian program mata anggaran lima dua pos belanja lima dua 219 milyar, pos lima tiga 194 milyar, sehingga total menjadi 1 triliun 446 milyar. Kemudian ini beralih dengan program nol enam untuk pengawasan yang tadinya di surat menteri tersebut 205 menjadi kami naikan menjadi 607, tapi secara total masih di angka 1,853,7 triliun. Ijin ini mohon dukungan dan persetujuan. Untuk pagu indikatif 2020 yang sudah kami bahas secara trilateral meeting dengan DJA dan Bappenas.

Untuk dukungan management sebesar 1,446 triliun digunakan untuk belanja sebagian besar belanja pegawai 71 persen, belanja modal sapras ini yang kami usulkan kembali Bapak Ibu sekalian sebelumnya kami mengusulkan pembangunan untuk provinsi perwakilan Provinsi Papua Barat dan Bangka Belitung kami mengusulkan dari sekarang supaya ijinnya mudah-mudahan keluar. Kemudian untuk penyelesaiannya, kemudian pembangunan tahap pertama gedung kantor perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dan Maluku Utara. Karena selama ini belum mempunyai gedung sendiri yang memadai. Kemudian juga pembangunan dua unit rumah negara type A dan pembangunan 35 unit rumah negara type B, C dan D di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo dan Papua Barat. Disamping itu dukungan management untuk membiayai operasional dan pemeliharaan kantor sebesar 10 persen dan dukungan pengawasan sekitar 5 persen. Untuk pengawasan sendiri kami mengalokasikan mengusulkan proporsinya sekitar 50 persen dari total anggaran pengawasan 407 milyar itu dialokasikan untuk di 34 perwakilan di seluruh Indonesia. Sedangkan di pusat hanya 25 persen untuk pengendalian dan pengawasan di lima kedeputian. Kemudian untuk pelatihan auditor dan pengelola keuangan negara kami alokasikan 18 persen atau 75 milyar. Untuk pengelolaan informasi pengawasan 4 persen dan selebihnya untuk pembinaan jabatan fungsional auditor, penelitian dan pengembangan serta inspektorat itu sekitar masing-masing 1 persen. Kemudian perbandingan target output tahun 2019 dan 2020 dengan adanya kami usulkan tadi peningkatan anggaran target 2020 meningkat sekitar 32 persen dibanding target 2019 output sekitar 1.581 unit. Terdiri dari pengawalan pembangunan nasional kami

memang untuk 2020 mencermati dari penugasan-penugasan selama ini kami coba untuk naikan di penugasan pengawasan pembangunan nasional. Kemudian untuk peningkatan ruang fiskal turun, untuk peningkatan tatakelola kami naikan juga Pak termasuk disini untuk pengawasan keuangan desa kami coba naikan juga. Untuk pengamanan aset negara kami turun sekitar 40 persen.

Ijin melaporkan juga hasil pengawasan di 2019 sampai dengan semester satu saat ini. Untuk tatakelola percepatan proyek strategis nasional atas peraturan yang ada kami sudah melaksanakan pengawasan untuk infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan energi, ini secara garis besar. Kemudian untuk fokus dua peningkatan ruang fiskal dalam rangka optimalisasi penerimaan dan penghematan pengeluaran negara sampai dengan per 14 Juni kami hasil laporan yang sudah kami himpun berkontribusi peningkatan ruang fiskal sekitar 5,4 triliun. Ini ijin tidak secara detail kami sampaikan. Kemudian untuk fokus ketiga di aspek pengamanan aset negara dan daerah, penyelamatan keuangan negara dan daerah yang sudah kami realisasikan potensinya di 2019 semester satu sekitar 134,82 milyar dan 2,25 juta US dollar, yang terdiri ada kegiatan tiga kegiatan yaitu audit investigatif atas permintaan aparat penegak hukum, audit perhitungan kerugian keuangan negara serta audit investigatif dari permintaan instansi yang terkait. Kemudian ijin melaporkan juga perkembangan implementasi sistem keuangan desa untuk di seluruh Indonesia. Sejak akhir 2018 ada peraturan Permendagri yang baru ini kami coba juga rancang updateting untuk programnya siskudes dan sudah diimplementasikan di 77,21 persen. Sementara yang sisanya sudah melaksanakan implementasi dengan versi satu versi lama. Untuk versi dua kami terus dorong untuk implementasi sesuai dengan peraturan Permendagri yang baru.

Untuk penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dengan ukuran penilaian mayoritas memang masih ada PR dari kami pemerintah di aspek kementerian lembaga target level tiga di atas, di atas tiga tahun 2019 baru tercapai 59,46 persen. Untuk pemerintah provinsi 75,86 persen dan pemerintah kabupaten/kota 50,56 persen. Untuk kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) capaian secara nasional sudah cukup meningkat kalau dibanding tahun 2014 sebagai base line terjadi kenaikan level tiga dari tahun 2014 ke tahun 2019 sebanyak 283 atau 61,8 persen dari satu waktu itu menjadi 284. Kemudian dari aspek peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja kami mendampingi khususnya barangkali di daerah teman-teman semua di daerah dari 540 Pemda KL atau pusat yang memperoleh opini WTP dan WDP dari BPK RI. Untuk Pemda khususnya dari 450 Pemda yang mendapat opini WTP dan WDP dari BPK RI sekitar 82 persen menggunakan produk aplikasi Simda dari BPKP. Dan kami mengembangkan terus Simda dengan Simda terintegrasi dari sejak perencanaan hingga pelaporan.

Demikian yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI ijin yang dapat kami sampaikan mohon dukungan dan persetujuan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih, kita lanjut ke LKPP. Silakan Bapak Kepala.

## **KEPALA LKPP:**

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi XI dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati,**

**Sekjen BPK beserta jajaran,**

**Kepala BPS beserta jajaran,**

**Sestama BPKP dan jajaran, serta hadirin yang kami muliakan.**

*Assalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Ohm Swastiastu,*

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

Setelah mendengarkan tiga dari lembaga sebelumnya Bapak Ibu Anggota yang saya hormati, bicaranya triliun saya di LKPP juga akan bicara triliun Pak tapi 0,169 triliun. Sebelum menyampaikan detail tentang rencana kerja dan anggaran LKPP tahun 2020 kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan profil LKPP, pencapaian kinerja LKPP tahun 2018, rumusan visi dan misi LKPP saya tidak bicarakan visi LKPP 2019 kita akan bicara dari 2020-2024, pagu indikatif tahun 2020 serta usulan tambahan anggaran tahun 2020. Lanjut, lanjut saja mohon ijin. Sesuai dengan Perpres 106 tahun 2007 yang dirubah dengan Perpres 157 tahun 2004, LKPP bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Didalam fungsinya LKPP mempunyai fungsi menyusun dan merumuskan strategi serta penentuan kebijakan dan standard prosedur di bidang pengadaan barang jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Penyusunan dan perumusan strategi serta ... (suara tidak jelas) kebijakan pembinaan sumberdaya manusia dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik atau elektronik programen, pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum serta fungsi penyelenggaraan pelayanan administrasi umum bidang perencanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga. Saat ini kami berdiri 2007 sudah hampir dua belas tahun, esisting ASN yang ada di LKPP 262 orang, kebutuhan idealnya 696 orang, sehingga ada gap 434 orang yang kami penuhi dengan tenaga orsosing. Sedangkan profil anggaran kami Bapak Ibu di 2015 297 milyar, kemudian 2016 turun karena 297 itu untuk menyelesaikan pembangunan gedung, 2016 140 milyar, 2017 190 milyar, 2018 224 dan saat ini 213 milyar di tahun 2019 dengan realisasi per 17 Juni mencapai 49 persen. Capaian kinerja di tahun 2018 dapat kami sampaikan profil pengadaan nasional Bapak Ibu nilai belanja APBN kita semakin meningkat 2,461 triliun di 2019, 2018 2.240 triliun.

Yang terkait dengan pengadaan itu ada tanda bintang satu kenapa lebih besar dari APBN karena ada 2.357 triliun di 2018, di 2019 2.987 triliun lebih besar dari APBN karena didalamnya ada APBD, ada BUMN dan BUMD yang

secara Perpres 16 2018 sudah diatur bahwa LKPP Perpres 16 hanya mengatur terkait dengan APBN dan APBD. Kenapa BUMN masih masuk didalam proses pencatatan kami karena sebelumnya ada BUMN yang meminta pendampingan di kami dan menjadi bagian yang harus kami monitor. Lanjut, ini kami ambil dari laporan LKPP sendiri di tahun 2018. Total transaksi melalui elektronik tahun 2018 sudah mencapai 391 triliun dari 1.040 triliun proses pengadaan yang harus dilakukan oleh pemerintah diluar BUMN dan BUMD, atau baru sekarang belum 37,7 persen.

Dan di bagian kanan terdapat akumulasi optimalisasi anggaran negara lebih dari 150 triliun yang terdata dalam sistem e-prokrument. Disitu tertulis selisih pagu dan hasil lelang dari pagu anggaran yang ada di alokasi anggaran di kementerian lembaga di pemerintah daerah. Setelah melalui proses tender terdapat efisiensi 2015 24 triliun meningkat di 2018 sebesar 62 triliun. Dengan indikasi mungkin ini hasil tendernya lebih bagus atau mungkin penyusunan anggarannya yang kurang bagus, sehingga terjadi efisiensi yang sangat besar. Lanjut, regulasi yang telah diterbitkan sudah ada Perpres nomor 16 tahun 2018 dan 13 peraturan lembaga sebagai turunan Perpres tersebut saat ini sedang kami susun peraturan kepala atau lebih kenal saya ini Peraturan Lembaga tentang Pengadaan Barang dan Jasa di desa yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan 314 Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di desa. Belum nanti kita bicara tentang dana kelurahan yang kita tahu ada sekitar, data BPS menunjukkan delapan puluh ribuan lebih yang setingkat dengan desa. Kami juga telah menyusun Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 tentang tatacara pengadaan badan usaha pelaksana penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Dan kami juga telah melakukan pendampingan terhadap empat proyek KPPU, proyek penerangan jalan umum, proyek sistem penyediaan air minum spam, tidak termasuk yang kemarin OTT KPK yang selama kami dampingi, proyek pengelolaan persampahan dan proyek Bandara. Lanjut, kami punya fungsi untuk mengembangkan SDM di pengadaan dan target sampai dengan 2024 nanti ada 7.500 pejabat fungsional pengadaan, tapi sampai saat ini baru terbentuk 1.735 jabatan fungsional. Yang terdiri dari Madya 84, Muda 687, Pertama 964, sehingga belum terpenuhi sebesar 5.765.

Sementara mereka adalah garda di depan untuk proses pengadaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dan mereka biasanya akan berhadapan dengan aparat penegak hukum, lebih sering ... Dan mereka banyak yang tidak ingin menjadi panitia pengadaan, dan ini menjadi tantangan buat kami sehingga kami harus betul-betul mendapatkan teman-teman pengadaan yang telah memenuhi sertifikasi untuk melakukan kompetensi di pengadaan. Lanjut, ini yang lebih sering kami kunjungi dengan teman-teman Bareskrim teman-teman Kejaksaan maupun permintaan pendampingan dari kementerian lembaga maupun daerah, karena kekhawatiran sampai saat ini Bapak Ibu yang kami hormati dari Anggota Dewan nomor dua adalah tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan. Dan nomor satunya suap itupun pasti suap terkait pengadaan sebagian besar. Sehingga saat ini kami sudah melayani 9.220 layanan advokasi terkait pengadaan, terlayannya 1.093 terkait permasalahan kontrak PBJ. Yang sering terjadi adalah kami menemukan bahwa kontraknya kurang disusun dengan baik sehingga menjadi celah terjadinya mungkin masih sifatnya administratif,



tapi administratif bisa menjadi celah untuk masuk kepada tindak pidana korupsi. 383 kasus terlayani pelayanan pemberian keterangan ahli dari target 100 kasus. Kami menargetkan 100 kasus dari anggaran yang ada ternyata permintaan sampai saat ini sudah kami layani 383 kasus. Dan tidak ahli tersebut tidak hanya dari LKPP sehingga kami juga punya tugas tadi membentuk SDM terkait dengan pengadaan. Dan kami sertifikasi untuk bisa memberikan keterangan ahli yang harus kami tugaskan dari LKPP kepada teman-teman yang merelakan dirinya menjadi ahli dibidang pengadaan. Pendampingan konsultasi pengadaan di 210 kementerian lembaga pemerintah daerah terdiri dari 19 provinsi, 123 kabupaten, 34 kota, 15 kementerian dan 19 lembaga. Terakhir kami melakukan supervisi pendampingan Asean Games dan Para Games tahun 2018 dan pendampingan pengadaan kotak suara Pemilu tahun 2019.

Bapak Ibu yang kami hormati Anggota Dewan. Opini BPK WTP 2015, 2016 kami WDP, upaya perbaikan dengan kerjasama yang baik dari teman-teman BPK untuk memberikan bimbingan BPKP akhirnya kami menuju WTP selama dua tahun ini di 2017 dan 2018. Penghargaan yang diterima LKPP nomor satu adalah predikat zona hizo, nilai tertinggi kategori lembaga dengan nilai 103,7 untuk predikat kepatuhan Ombusman tahun 2018. Predikat menuju informatif peringkat pertama untuk kualifikasi menuju informatif kategori lembaga negara dan LPNK yang ...(suara tidak jelas) oleh Komisi Informasi Pusat. Pengelolaan pegawai terbaik BKN Award terkait pengelolaan kepegawaian terkait terbaik kategori LPNK. Empat, penghargaan dari asosiasi dan media terkait digital informasi. Dan yang terakhir kemarin adalah penerima insentif atas kinerja tahun 2018 dtg kategori kementerian lembaga dengan pagu anggaran kecil. Kami dapat tambahan 30 milyar dari Kementerian Keuangan sebagai insentif. Ini rumusan visi misi kami, kami sesuaikan dengan LKP pemerintah tahun 2020, dimana adalah prioritas nasional yang terkait dengan nilai tambah sektor riil industrialisasi dan kesempatan kerja prioritas nasional ketiga, dan stabilitas pertahanan keamanan terkait dengan program prioritas penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi dengan pengarusutamaan dari enam pengarusutamaan LKPP ada di tatakelola pembangunan berkelanjutan dan transformasi digital dengan program-program prioritas yang ada di RKP 2020. Lanjut, kami punya visi rumusan tentunya kami sesuaikan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih kedepan karena kami menjadi bagian dari lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden yaitu menjadi lembaga pengadaan berkelas dunia untuk pembangunan ekonomi nasional eksklusif. Sedangkan misi ini menjabarkan fungsi yang ada saat ini yaitu mengembangkan kebijakan pengadaan untuk sinergitas ekosistem pengadaan. Bapak Ibu kami sampaikan kami sudah melalui e-payment, e-purchasing. Kami berharap e-payment ini jalan, saat ini kami dengan katalog itu orang beli tinggal klik tapi bayarnya masih pakai SP2D Pak. Jadi masih lama proses untuk pembayarannya sehingga penyedia masih banyak yang mengeluhkan, Pak sudah e-prokument, e-purchasing tetapi kenapa masih sistemnya masih menggunakan SP2D. Membangun kognitif prokument sistem yang selaras dengan praktek terbaik dunia dan meningkatkan kapabilitas SDM pengadaan. Ini tidak hanya di LKPP, termasuk masyarakat, termasuk aparat penegak hukum dan instansi lainnya terkait dengan pengadaan yang profesional kelembagaan yang kredibel.

Kelambagaan ini tidak hanya kelembagaan LKPP saja yang akan kami bangun termasuk KPBJ unit kerja pengadaan barang dan jasa yang ada di KL dan pemerintah daerah. Lanjut, mohon ijin tidak kami bacakan secara lengkap prioritas LKPP penguatan regulasi untuk menjamin mutu pengadaan, pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa. Lanjut, penguatan SDM dan kelembagaan pengadaan sekali lagi tidak hanya untuk di LKPP tapi untuk teman-teman di kementerian lembaga dan teman-teman pengadaan di daerah. Hukum dan penyelesaian sengketa, ini kami bekerjasama dengan BPKP untuk menciptakan property advisor di beberapa daerah di Indonesia menjadi bagian nanti dengan property audit yang ada di LKPP.

Kemudian penguatan internal di LKPP, karena kami menemukan di RB kami masih ada hal-hal yang perlu kami tingkatkan dalam delapan area perubahan yang berdasarkan penilaian Menpan, kapasitas pegawai LKPP, sarana prasarana dan penguatan kelembagaan LKPP termasuk reorganisasi di LKPP. Lanjut, pagu indikatif mohon ijin kami sampaikan bahwa pagu indikatif ini sebelum tadi disampaikan oleh yang terhormat Ibu Indah apakah kami berkoordinasi dengan Bappenas dengan Keuangan iya, apakah usulannya disepakati iya, tetapi apakah usulannya sebesar ini tidak. Dan kami mendapatkan pagu ini sangat turun dari pagu 2018, 2019. Dan kami mengusulkan sebenarnya tidak sekecil ini, karena ada tugas-tugas yang harus kami kawal didalam proses pembangunan dari 1000 triliun pengadaan. Dan kami lebih banyak memang mohon nanti tidak terjadi salah pengertian di teman-teman di yang kami sampaikan kepada keuangan Bappenas. LKPP lebih banyak belanja barang, iya bukan belanja modal. Belanja barang kami sekitar 78 persen dan itu digunakan untuk pengembangan SDM, perjalanan dinas dalam rangka advokasi, dan kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya LKPP harus melakukan pendampingan. Pembangunan sistem nanti kami ... dan sebagainya ada di program pengembangan sistem, tapi dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya LKPP dan program ... sistem itu terlihat alokasinya operasionalnya hanya 67 kalau kita lihat data detailnya kami belanja pegawai kami hanya 13 persen, belanja barang kami bisa mencapai 78 persen dan belanja modal kami tidak lebih dari 20 persen. Lanjut, usulan tambahan kami

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Ijin, ijin Pimpinan.

**KEPALA LKPP:**

*Nggih.*

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Kembali ke screening tadi Pak Ron.

**KEPALA LKPP:**

Ya.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Itu 169 berapa Pak.

**KEPALA LKPP:**

169 milyar. Makanya saya bicara tadi teman-teman BPK triliun, triliun saya 0,169 triliun Bu. Dan ini sangat turun dari dua ratus

**F-NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):**

Pimpinan, Pimpinan mohon maaf. Ini supaya akurat Pak ya, ini dibacanya 169 juta Pak.

**KEPALA LKPP:**

Mohon maaf kurang nolnya tiga.

**F-NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):**

LKPP ngga boleh begini ini.

**KEPALA LKPP:**

Siap Bapak.

**F-NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):**

Ini seperti begini.

**KEPALA LKPP:**

Siap.

**F-NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):**

Kan urusannya angka-angka. Itu kenapa itu ditanya trigernya Cuma itu.

**KEPALA LKPP:**

Siap.

**F-NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):**

Kehati-hatian dan keakuratannya, terima kasih.

**KEPALA LKPP:**

Terima kasih atas koreksinya.

## **F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Ijin, kecuali di atasnya dikasih keterangan Pak.

## **KEPALA LKPP:**

Ribuan, siap. Edit sekarang, ya rincian pagu indikatif Rp. ribuan dalam kurung ribuan, mohon maaf. Untuk slide berikutnya juga tolong ditambahkan. Belum selesai kan, sudah, ...(suara tidak jelas) dia mohon ijin, dipaparkan kelihatan dulu di atas.

Mohon ijin kami lanjutkan. Ini juga kurang kosongnya ya, tambahkan di atasnya yang rpnnya itu ribuan Mba. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih koreksinya. Di 2018 kami menunjukkan saja alokasi yang kami terima sebesar 224 milyar dengan realisasi ...(suara tidak jelas) persen. 2019 yang sedang berjalan alokasi anggaran LKPP 213 dengan realisasi per 17 Juni 49 persen. Dan di bulan Juni kemarin kami mendapatkan tambahan 30 milyar sebagai insentif dalam rangka pencapaian kinerja LKPP sehingga alokasi total pagu di LKPP menjadi 243. Dan kami mengusulkan ke Bappenas waktu itu ...(suara tidak jelas) Menteri Keuangan pagu 2020 sebesar 313, namun yang kami terima pagu indikatif menggunakan base line jelas belanja barang 116.707.000.000,- sehingga kami mengusulkan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan untuk mohon nanti dapat disetujui oleh Anggota Komisi XI yang terhormat sebesar 286.382.466.000,-. Usulan tersebut kami gunakan untuk menambahkan 116 tersebut. Lanjut, memberikan dukungan pada 20 proyek prioritas nasional sebesar 10 milyar untuk pendampingan, providi advis, konsolidasi dan peningkatan layanan LPS (Lembaga Penyelesaian Sengketa) dan SPD, kemudian penguatan pengadaan barang dan jasa desa sebesar 9 milyar 400 juta, ...(suara tidak jelas) untuk penyusunan standard dan pedoman teknis pengadaan di desa, pelatihan pendampingan pengadaan di desa. Kemudian penyusunan standard dan pedoman teknis KPPU dan pendampingan empat peraga PPU sebagai alternatif pembiayaan pemerintah. Kami mengusulkan 3,8 milyar dan membandingkan dengan kebutuhan yang akan kami dampingi untuk pengelolaan persampahan, listrik Legok Nangka dan Kota Semarang sekitar investasinya tiga koma triliun, dan 1,9 triliun. Penerangan jalan umum Kota Surakarta 550 milyar, pengembangan Bandar Udara Singkawang 1,3 triliun, sistem penyediaan air minum Pakanbaru 750 milyar. Penguatan sistem infrastruktur IT pengadaan nasional, Anggota yang kami hormati ini sangat penting buat LKPP sampai hari ini kami harus menangani kasus keamanan terhadap securitas sistem kami. Kami sudah berupaya untuk menjamin ke tir tiga kami akan naik ke tir empat dengan angka yang tidak memadai kami mengusulkan untuk perbaikan sistem, untuk pengamanan sistem karena proses pengadaan yang e-prokrumentpun masih bisa dibobol dari luar dan itu mempengaruhi proses pengadaan sehingga pihak-pihak tertentu saja yang masih bisa melakukan akses terhadap sistem yang ada. Dan ini sedang kami dalam bersama teman-teman di Gakum di suatu provinsi beberapa provinsi dan kami berkoordinasi dengan gubernurnya untuk kami tarik kembali sistem yang kami desentralisasi ke pusat dulu. Kemudian penguatan kelembagaan internal LKPP ...(suara tidak jelas) 38 milyar, untuk ...(suara tidak jelas) struktur organisasi LKPP. Peningkatan

kapasitas SDM LKPP, peningkatan sarana prasarana kerja termasuk redesign layout ruang kerja dengan memperhatikan gedung yang dibangun 2015 belum memadai dengan kebutuhan pegawai yang jumlahnya sangat ini terus kami upayakan mencapai kondisi yang ideal. Sehingga kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar 116.700.032.000,- didalam forum yang terhormat ini dan kami akan sampaikan juga nanti kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Saya kira itu Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat.

Terima kasih,

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, saudara sekalian setelah kita mendengarkan dari narasumber empat mitra kerja yaitu BPK RI, BPKP, BPS dan LKPP maka kita masuk ke sesion kedua yaitu pendalaman. Kita mulai dari sisi sebelah kiri. Silakan Pak Edison Betaubun.

#### **F-PG (EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.):**

**Ya Pimpinan komisi yang saya hormati,  
Teman-teman Anggota Komisi XI yang saya hormati,  
Sekjen BPK, Kepala BPS, Kepala BPKP dan Kepala LKPP yang saya hormati.**

Saya kira materi-materi yang tadi disampaikan sudah kita pahami. Dan sebagai mitra Komisi XI kita pasti menyetujui, tapi saya perlu menegaskan bahwa kinerja BPKP, BPS, BPK dan LKPP itu dalam pengawasan kita. Dan kita akan mengawasi bahwa kinerjanya itu benar-benar betul sesuai dengan apa yang disampaikan atau tidak. Supaya jangan sampai dipikirkan bahwa DPR Komisi XI Cuma bicara tentang anggaran setelah itu terus selesai. Kita akan mengawasi supaya setiap laporan-laporan itu masuk akal atau tidak. Dan dalam kaitan itu saya perlu pertanyakan kepada BPK dan BPKP. Apakah BPK sebagai badan pemeriksa keuangan itu juga melakukan pemeriksa keuangan terhadap dana desa? Coba dijawab sekarang dulu sebelum saya lanjut. Apa itu juga dilakukan itu.

#### **SEKJEN BPK:**

Pemeriksaan yang dilakukan untuk dana desa dilakukan melalui pemeriksaan kinerja, kinerja ... tapi tidak dilakukan kepada seluruh desa, tapi melalui sampel yang ada.

#### **KETUA RAPAT:**

BPKP?

## **KEPALA BPKP:**

Terima kasih Pak.

Barangkali BPKP sebagai internal audit pemerintah lebih banyak ke pendampingan Bapak Ibu sekalian melalui kita mengembangkan aplikasi Siskudat yang sudah Bapak Ibu juga bersama mengetahui bagaimana implementasi di desa. Karena kami pikir SDM desa sangat-sangat membutuhkan aplikasi ini untuk memudahkan pengelolaan keuangannya. Jadi kami lebih banyak mendampingi di aspek penguatan tatakelolanya Pak.

Terima kasih.

## **F-PG (EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.):**

Ya, jadi apa yang tadi disampaikan itu benar-benar adalah sebuah keanehan. Pengelolaan dana desa itu, saya tidak tahu di daerah lain, tapi di daerah pemilihan saya di Maluku itu kacau balau semuanya. Lalu setiap saat Pemerintah dan DPR menaikkan anggaran dana desa. Lalu apa peran BPK dan BPKP lalu BPKP melakukan pengawasan, pengawasan apaan. Apa memang BPKP juga melakukan pengawasan kong kalikong, karena itu fakta yang terjadi. Jangan karena BPKP kalau melakukan itu lalu BPKP itu bagian daripada pemerintah, lalu akhirnya kong kalikong. Di Maluku sana rata-rata semua desa itu hancur semua pengelolaan dana desa. Bahkan itu sudah naik di berita-berita. Lalu apa, lalau BPK dan BPKP ada di Maluku terus manfaatnya untuk apa. Apakah ada juga setor-setor kepada BPK dan BPKPD Provinsi Maluku. Makanya supaya itu dibuktikan. Saya minta BPK dan BPKP supaya melakukan audit dana desa di Kota Ambon dan di Seram bagian barat, itu dulu sebagai uji coba. Karena sudah keluar di berita juga bagaimana kepala-kepala desa setor-setor kepada Bupati-Bupati. Ya dana-dana desa di setor-setor lalu apa peran BPK dan BPKP. Kok masih ada di daerah-daerah sana semua ada BPK dan BPKP kok tidak ada peran apa-apa soal dana desa. Nah kalau memang seperti itu supaya BPK dan BPKP mengeluarkan aturan baru lagi, supaya kalau ada korupsi dana desa tidak perlu ditindaklanjuti lagi. Supaya itu barang jelas, supaya kinerja BPK dan BPKP tetap dalam pengawasan kita. Jadi tegaskan kepada BPK dan BPKP di Maluku sana itu, contoh kasus nyata. Ini karena Ketua BPKP tidak hadir, Pak Ardan silakan tanya. Tahun kemarin saja ada orang sudah desa-desa sudah melaporkan pengelolaan dana desa yang tidak betul oleh kepala desa, sudah sampai ke Polisi. Polisi minta BPKP untuk audit. Itu saja berbulan-bulan tidak selesai, maka saya telephon Ketua BPKP Pusat Pak Ardan, baru diperintahkan itu barang jalan. Itu apa model begitu.

Jadi jangan menyampaikan laporan-laporan bohong kepada Komisi XI DPR. Kita akan terus mengawasi kinerja BPS, BPK, BPKP dan LKPP. Karena teman-teman yang lain mungkin masih bisa toleransi, kalau saya tidak ada urusan. Saya temukan hal tidak betul akan saya bongkar, supaya itu barang jelas. Jadi saya pingin supaya dua kabupaten satu Kota Ambon dan Kabupaten Seram bagian barat itu yang sudah beredar di berita kepala-kepala desa setor-setor kepada bupati itu dan sudah diperiksa oleh pihak Polisi supaya itu coba diaudit, supaya benar-benar ditemukan kerugian atau tidak, di semua desa

disitu. Jangan sampai nanti Pemerintah dan DPR terus menaikkan anggaran dana desa tiap tahun naik-naik terus, terus apa manfaat bagi kepentingan masyarakat disitu. Jadi kalau pengawasan dari BPKP tidak dilakukan pengawasan secara baik ya berarti kita ganti nama BPKP, bukan lagi badan pengawasan, supaya itu barang jelas. Jadi kita robah menjadi badan persetujuan saja, supaya itu barang jelas menjadi perhatian. Itu saja catatan saya ketua supaya menjadi perhatian dan saya akan terus monitor. Saya sudah sampaikan dalam rapat resmi ini saya akan monitor bahwa di dua daerah itu di Dapil saya di Maluku dilakukan audit oleh BPK dan BPKP atau tidak. Dan kalau sudah dilakukan audit supaya itu disampaikan kepada kita, karena ini resmi. Ini bukan kita bicara di balik layar. Itu saja catatan yang perlu saya sampaikan ketua fungsi pengawasan kita. Kita harus memberikan penegasan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik Pak Edison.

Kita lonjut ke sisi kanan. Silakan Pak Jonn Erizal. Pak Heri

**F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):**

Ya siapa, siapa ini, Heri atau saya, siapa. Pak Ketua siapa Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Oh tunggu Pak Menteri. Sekarang sebelah kanan Pak menteri. Siap Pak Menteri.

**F-GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):**

Pada intinya manis jambu Pak. Pak Ketua, teman-teman Anggota dan para mitra kenapa saya bicara manis-manis jambu. Di satu sisi melihat ada kegembiraan BPS naik anggarannya walaupun ada beban untuk melakukan sensus penduduk. Akhirnya ya lumayanlah daripada tidak sama sekali. Hanya yang disayangkan ada dua catatan BPKP naik juga, ya lumayan walaupun tidak seimbang. Cuma ada dua yang agak menyedihkan, pertama BPK yang kedua LKPP. Bahkan tadi ada kejadian menarik. Sebelah saya bertanya LKPP itu apa ya, singkatannya apa. Ya saya pikir ini juga koreksi untuk LKPP. Kita kalau mau bermitra *mbokya* berkomunikasi begitulah. Selama ini kayanya komunikasinya belum jalan. Ya terlepas ada anggaran ataupun tidak, ya kalau jadi pemimpin nyamannya kita berkomunikasi, sehingga pada saat kita mau mengajukan anggaran, anggarannya ternyata hanya nol koma sekian triliun, di satu sisi berbicara ingin menjadi pengadaan yang berkelas dunia rasanya kan ngga mungkin. Harusnya kan ada komunikasi. Kalau harusnya ada komunikasi saya pikir ini catatan yang harusnya segeralah dikomunikasikan. Karena apapun terjadinya kan Menteri Keuangan juga adanya di Komisi XI, masa sih kita ngga bisa bisik-bisik begitu loh, kalau memang untuk kepentingan negara kita. Kalau

tidak ya lain cerita, ya kalau mitranya juga berkelas dunia tapi ngga mau berkomunikasi ya kita juga tidak bakalan mau komunikasi juga.

Saya pikir mestinya jalan. Ini bukan masalah yang krusial itu. Cuma Pimpinan Anggota yang saya hormati didalam ketatanegaraan kita itu dikenal ada tujuh lembaga negara, lembaga tinggi negara. Diantaranya ada DPR, ada MPR, bahkan ada BPK didalamnya. Cuma yang agak aneh anggaran kita naik terus, ini bagaimana Pak Arif. Bagaimana Pak Arif bisa buat LHKPN atau IHPS kalau anggaran Pak Arif dipotong. Saya pikir ini jadi konsern kita pimpinan. Baru-baru ini datang ke Komisi XI, ada permohonan revisi untuk Undang-Undang BPK. Kita ketahui tidak begitu lama lagi kita akan memilih lima Anggota BPK, yang akan habis masa jabatannya. Nah kalau anggarannya dipotong dari sekretariat, bagaimana mereka buat laporan kalau begini. Saya pikir ini jadi bahan pertimbangan. Seharusnya seperti tadi disampaikan BPK ini kan lembaga tinggi negara, kalau mau dibahas sama Menteri Keuangan *mbokya* ngobrol dulu gitu loh BPKnya. Kita ngobrol dulu sekretariat BPK sama Komisi XI kita ngobrol dulu, setelah datang apa ada datanya baru kita sampaikan ke Kementerian Keuangan, baru dibuat pagu indikatifnya. Ini kok lembaga tinggi negara diatur menteri bagaimana, menterinya sok pintar lagi, padahal pintar ngutang. Saya pikir ini harus jadi konsern pimpinan, kalau kita memang mau bermitra dan mitra kita ingin menjadi mitra yang sesungguhnya sebaiknya kita suport mereka. Tapi di satu sisi kita juga meminta suport dari para mitra untuk berkomunikasi. Komunikasi ngga perlu pakai duit kok komunikasi itu, ngobrol datang gitu loh. Silaturahmi sajalah ada kendala apa kita bicarakan, ngga perlu dalam forum-forum resmi seperti ini, itu harapan saya kedepan. Pada intinya kalau ada penambahan atau optimalisasinya kita akan suport kita akan dukung terkait untuk BPK apalagi nanti ada lima Anggota baru saya berharap kekurangan sebesar lima ratusan ini bisa kita bicarakan dengan Menteri Keuangan.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Pindah ke sebelah kiri, Ibu Indah dulu, setelah itu Haerul.

#### **F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Terima kasih Pimpinan. Prinsipnya saya sangat mendukung agar seluruh anggaran yang diajukan oleh BPK, BPKP, LKPP dan BPS ini bisa diberikan sesuai dengan peran, fungsi dan tugasnya masing-masing. Karena pemotongan tadi yang saya sempat interupsikan tadi Pak, bahwa kalau memang selama ini surat bersama itu Bappenas dan DJA Menteri Keuangan itu memang termasuk kami Pak yang mendapatkan pemotongan itu, itu saya pikir mungkin disesuaikan dengan spare fiskalnya, kebutuhan eh sorry apa penerimaan yang diterima yang mungkin harus diatur tetapi tentu ada tugas-tugas dan peran-peran yang tidak mungkin bisa dinego lagi, tidak bisa direjut misalnya seperti yang BPK tadi. Dengan sekian tiga dari empat ribu sekian hanya bisa dilakukan sekian ratus dan sisanya itu signifikan sekali, kalau itu ngga dikerjakan tadi hanya bisa sampai triwulan satu saja ya Pak ya, triwulan dua dan tiga tidak. Nah saya pikir itu perlu dibicarakan, tapi kalau bisa kan tidak



ke Komisi XI Pak. Jadi kalau tadi ada dari Bappenas dan kemudian dari DJA sebaiknya bahwa BPK dalam hal ini sebagai auditor kan bisa menyampaikan. Tidak kemari jadi dari 4,4 yang saya ingat tadi kemudian diberikan pagu indikatif 3,3 dan akhirnya BPK mengajukan lagi melalui kami 1,60 totalnya kan akan menjadi empat sekian.

Nah itu saya pikir mungkin tidak perlu seperti itu mekanismenya diatur sehingga pada saat ke kami itu sudah menjadi pengajuan yang rasional untuk bisa dilaksanakan sesuai peran dan tugas, fungsi pokok masing-masing. Sementara untuk LKPP Pak Ron saya mau menanyakan saja, itu tender itu dari dari seluruh kementerian lembaga itu berada di LKPP, berarti lembaga ini sangat strategis Pak Heri, sangat strategis. Dan daerah termasuk semuanya dengan 262 orang tadi yang kerja Pak, ya pantas tadi ada yang agak mis sedikit ya Pak ya kurang keterangan dalam ribuan tadi ya karena orangnya harusnya idealnya tadi berapa 600 ya, oh ya 696 hampir 700 idealnya, tetapi yang tersedia hanya 262. Ya jadi kalau ada sebagian kawan-kawan yang tidak mengetahui LKPP ya saya sangat paham orang kami pun kadang-kadang juga lupa karena kami yang sudah saya kebetulan ketemu dengan LKPP ya mungkin setahun sekali Pak Heri pada saat pengajuan RDP untuk pengajuan RKAKL seperti ini. Nah saya pikir itu mungkin bisa disampaikan kalau Pak Kenda ada masalah ya BPS ya Pak ya. Saya Cuma mau menyampaikan itu saja Pimpinan bahwa paling tidak untuk kebutuhan anggaran itu yang lebih tahu adalah lembaga dan badan itu masing-masing, seperti apa idealnya anggaran itu bisa mencukupi kebutuhan mereka selama setahun. Kalau memang tidak bisa bekerja dengan itu ya harus disampaikan, tidak menerima terus kemudian mengajukan usulan, saya pikir itu adalah sesuatu yang agak sedikit naif.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, pindah ke kanan Pak Achmad Hatari, silakan.

#### **F-NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

**Minta ijin ke Poksi dulu.**

*Assalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Bapak dari BPKP, BPS semuanya Pak ya.**

Yang pertama setelah saya bolak-balik ini RKA BPK dengan pagu indikatifnya ya, pabluser, halaman per halaman saya lihat ini resening yang biasa baik itu saya menganggap penting menyoroti pada halaman 13 yaitu pagu indikatif tahun 2019 itu sama dengan pagu indikatif 2020, atau 2020 terjadi kekurangan dibandingkan dengan 2019 sebesar 12,51 persen atau setara kurang lebih 440 milyar koma 421. Satu jumlah yang sangat material. Kalau jumlah sebesar ini Pak Ketua dan teman-teman Anggota Komisi XI kalau tidak dipenuhi oleh pemerintah akan terjadi stagnan kurang lebih saya catat disini kurang lebih ada 3.461 LHP yang tidak bisa dijalankan, bukan satu jumlah yang kecil loh Pak. Karena itu dengan segala hormat pimpinan rapat pada sore hari ini teman-teman ini ada Pak Sekjen dan lain-lain dan lain-lain peran kapasitas kapabilitas yang beliau miliki. Saya ingin mengedepankan pendapat

disini hanya meminta kurang lebih satu milyar. Pak Sekjen, Pak Kapoksi satu milyar BPK meminta tambahan dengan harapan 3.461 LHP ini tidak terlantar. Terdiri dari 195 LHP kinerja, kemudian dengan tujuan tertentu dan seluruhnya 3.461 tidak tersedia dananya. Kita mengadakan anjing saja dananya 3,7 triliun. Mau beli anjing pelacak saja 3,7 triliun, apalagi kita bersepakat untuk menambah satu triliun untuk menyelesaikan 3.461 LHP yang tertunggak. Dan karena itu atas ijin Ketua Sekjen Partai Nasdem Nasdem menganggap perlu untuk meminta dukungan dari fraksi-fraksi lain di komisi ini untuk memperjuangkan.

Saya akan melaporkan kepada Sekjen partai saya untuk mengangkat ini di Badan Anggaran. Kebetulan saya dipercayakan partai juga duduk di Badan Anggaran, dan karena soal yang satu ini Insha Allah saya akan bawa di forum Badan Anggaran. Tugas dan tanggung jawab, kewenangan, beban tugas tidak sebanding dengan yang lain-lain. Kemarin kita bahas Kementerian Keuangan dan juga mitra dari kita. Kalau kita bicara mitra ini tadi sahabat saya dari Maluku, anak cuku dari Kapitan Patimura tadi bicara itu maka lebih focal lagi. Kalau forum ini dengan Menteri Keuangan apa yang dia konsentir benar adanya. Jadi kembali lagi kepada BPK mudah-mudahan atas ijin pimpinan saya minta dukungan semua lebih khusus lagi dari fraksi partai saya Nasdem yang duduk di Badan Anggaran kita perjuangkan ini dengan segala argumentatifnya itu. Pabluser, Pak Sekjen mudah-mudahan, tadi sebenarnya rapat hanya pimpinannya tidak cukup karena itu cancel rapat Banggar tadi. Kemudian terkait dengan BPK dana desa Pak Sekjen. Ada satu alat kelengkapan dewan yang terbentuk kira-kira bulan Februari yang lalu dan sudah bekerja sesuai Tupoksinya. Dan kami sudah kemana-mana tapi masih fokusnya terbatas soal dana desa. Dana desa ini menjadi isu yang mengemuka sehingga atas perintah lembaga badan yang bernama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara ini yang juga merupakan mitra kontervalen daripada Badan Pemeriksa Keuangan ya sudah jalan. Padahal yang saya lihat maaf Pak Sekjen dan semua BPK seperti setengah hati, maaf BPK seperti setengah hati. Apa setengah hati, ketika kita mendatangi daerah yang kita melakukan telahan atas hasil pemeriksaan BPK yang disajikan Cuma dua kertas saja, dua kertas dua lembar kertas. Susah kita bedakan, ini paper dari BPK atau memang kertas untuk bungkus kacang, memalukan. Lah terus apa yang kita lihat situ, namanya saja telahan atas hasil pemeriksaan BPK, apa yang mau kita telah, loh dua kertas bungkus kacang. Itu yang terjadi karena itu tolong Pak Sekjen dan semua petinggi BPK dihimbauah kepada Kepala-Kepala BPK perwakilan jangan menganggap remeh menganggap enteng ini yang namanya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara loh Pak, itu Pak. Masih Pak ini bukan saya dramatisasi loh ini Pak Sartono ada disini. Masih jauh BPKP dengan papernya yang luar biasa bagus. Di Ambon di tempatnya ini Pak Betaubun, saya pernah mengatakan ada Wagub BPK tidak siap seperti main-main terhadap Komisi XI ini. Itu yang kita ketemu di lapangan kemarin.

Ada beberapa disini kita mencatat Pak termasuk LKPP. Ada kekurangan disana-sini tapi menurut saya tidak terlalu matrial. Mudah-mudahan kita mengetuk hati dari Menteri Keuangan, Menteri Bappenas. Kemarin kita menyetujui hampir 45 triliun. Ada dua belas atau empat belas Satker dari kementerian ini. Dibuka nol koma nol koma nol koma nol sekian persen saja sudah lebih dari satu triliun untuk menutup tadi supaya 3.461 tidak ada

tunggakan lagi. Kalau tidak tunggakan ini menumpuk menumpuk menumpuk, apalagi Pak Sekjen.

Kita bicara tentang tindak-lanjut hasil pemeriksaan. Sementara tiap tahun menumpuk seperti begitu bagaimana Bapak mau berpikir tentang tindak-lanjut hasil pemeriksaan, rumit Pak. Dan juga ini bukan Komisi XI Pak ya, ini bukan sekarang terungkap di ruangan Komisi XI yang disampaikan oleh Anggota Fraksi Partai Nasdem, tetapi fenomena ini sudah berakar bahwa seperti opini BPK ini menjadi komoditas daripada BPK. Tolong ini harus diminimize, ngga usah kita berikan contoh. Tolong ini harus diminimize. Apa yang disampaikan kami tidak maksud lain Pak, demi Tuhan kita sebagai orang beragama hanya rasa cinta dengan pendekatan kemitraan, dengan pendekatan sahabat. Tetapi yang mencuat Pak Sekjen adalah seperti begitu, dimana-mana, tapi kami tetap tangkis tangkis. Ada kriteria tentang BPK memberikan sesuatu opini, standard akuntansi, SPI, kepatuhan, ada empat kategorisasi itu, jadi tidak sembarangan. Apalagi opini BPK adalah pernyataan profesional yang memang tidak bisa dirundingkan, begitu terkait dengan tatakelola, itu tangkis kita. Karena tadi Pak pendekatannya mitra sahabat. Jadi barangkali itu, tadi dari BPK, BPKP kemudian LKPP kita sudah catat disini ada 116 milyar dan sekian sekian mudah-mudahan ini atas ijin disini teman-teman yang duduk di Banggar Insha Allah kita bersuara di Badan Anggaran. Pada akhirnya muaranya ada disana. Terima kasih banyak Bapak dari BPKP, dari BPS, LKPP dan BPKP terima kasih banyak. Mohon maaf kalau intonasi suaranya agak D minor saya minta maaf.

*Wassalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih. Kita lanjut sisi kiri Pak Haerul Saleh, silakan.

#### **F-GERINDRA (HAERUL SALEH, S.H.):**

**Hampir saya tidur Pak.**

**Terima kasih Pak.**

**Pimpinan komisi serta rekan-rekan Anggota Komisi XI yang saya hormati, Kepala lembaga LKPP, BPKP, Sekjen BPK, Kepala BPS dan seluruh jajaran yang hadir.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Salam sejahtera untuk kita sekalian.**

*Shaloom.*

*Ohm Swastiastu.*

*Nama Budaya.*

Ya LKPP, LKPP Pak, lembaga kurang publikasi publisitas. Ya itulah memang harus ditingkatkan. Saya langsung ke BPKP, BPKP ini ada yang menarik terkait dengan pengawasan atau monitoring penggunaan dana desa. Saya sendiri sudah mengikuti dua kali kegiatan bersama dengan BPKP dan saya melihat ini, sistem yang dikembangkan oleh BPKP ini merupakan sebuah sistem yang sangat baik dan terbukti betul-betul bagus. Nah yang saya heran kok ini tidak dijadikan apa namanya sebuah sistem baku atau dalam arti tidak

didukung oleh regulasi yang mau tidak mau suka tidak suka desa itu harus menggunakan itu gitu. Padahal kan kita sudah akui bersama bahwa ini efektif, minimal ketika ada kesalahan langsung gampang terbaca. Lalu kenapa ngga diterapkan kepada semua kepala desa menjadi sebuah sistem yang harus digunakan sehingga pelaporan keuangannya tidak lagi kita tidak sulit lagi untuk apa mengetahui ada kesalahan ataupun ada kebocoran-kebocoran dana yang dikelola oleh desa-desa. Saya kira itu Pimpinan mungkin perlu dipertimbangkan. Memang kita harus mendorong agar BPKP ini ditunjang oleh regulasi yang memadai sehingga sistem yang dikembangkan bisa dimanfaatkan secara efektif oleh seluruh desa-desa yang ada di Indonesia ini. Itu yang untuk BPKP, begitu.

Kemudian selanjutnya ya Sekjen apa itu BPK ya, BPK iya. Kalau BPK bicara BPK ini memang saya sependapat dengan kawan-kawan semua. Sebagian besar anggaran atau kurang lebih setengah anggaran ini yang non operasional itu yang gunakan siapa Pak, boleh saya ijin interaktif. Yang menggunakan yang non operasional itu banyak digunakan oleh kebijakan-kebijakan Pimpinan BPK gitu, Anggota BPK nya.

#### **SEKJEN BPK RI:**

Itu untuk pemeriksaan di lapangan baik pusat maupun perwakilan.

#### **F-GERINDRA (HAERUL SALEH, S.H.):**

Dan itu ditentukan oleh kebijakan Anggota?

#### **SEKJEN BPK RI:**

Betul, kami mengajukan usulan di

#### **F-GERINDRA (HAERUL SALEH, S.H.):**

Maksud saya begini Pak, karena ini adalah berkaitan dengan kebijakan Anggota yang bersangkutan seharusnya yang berdiskusi dengan kita ini adalah mereka, ikut terlibat dalam komunikasi itu. Walaupun makanya ini yang harus diperbaiki kedepan. Sekarang ini memang iya, maksudnya kedepannya kita ini idealnya berbicara tentang koordinasi pengawasan penggunaan anggaran. Idealnya mereka yang memiliki apa namanya yang mengeluarkan kebijakan itu harus berdiskusi dengan kita supaya kita tahu seperti apa pemikiran besarnya seperti apa tujuannya apa dan itu bisa dijelaskan oleh mereka, gitu. Nah misalnya gini, kita lihat Pak opini-opini yang dihasilkan yang dikeluarkan oleh BPK itu semuanya kan harus berdasarkan kebijakan anggotanya. Auditor itu hanya menyajikan laporan yang sudah pemeriksaan yang sudah dilakukan, lalu kemudian yang mengeluarkan opini itu adalah anggota. Nah kita lihat Pak, auditor sudah melakukan apa namanya pengawasan, monitoring, pemeriksaan yang jelas-jelas banyak sekali masih ada temuan-temuan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya kita bisa lihat semuanya. Kementerian Keuangan lah misalnya baru saja, baru saja Anggota BPKnya Pak Agus Joko Pramono ya menyampaikan di media bahwa pencatatan hutang ini ada

macam-macamlah bisa kita, kita semua tahu itu.

Kemudian ada masalah terkait dengan Freeportlah yang negara berpotensi mengembalikan uang pajak dan sebagainya dan sebagainya masih banyak catatan-catatan yang perlu perbaikan dan masih ada pelanggaran ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tapi kok masih tetap dapat WTP, lalu WTP itu apa sebetulnya tujuannya. Kalau dalam kondisi masih banyak kekurangan kita sudah dapat WTP perbaikan apa lagi yang kita harapkan, untuk apa lagi perbaikan. Saya begini-begini saja dapat WTP kok. Ya dan itu bukan hanya di kementerian, sepuluh kementerian yang ditemukan ada hutang, hutang yang tidak tercatat misalnya tapi tetap saja dapat WTP. WTP ini betul mungkin, mungkin betul bisa jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Hatari tadi bahwa jangan sampai ini hanya jadi komoditas BPK.

Nah di daerah-daerah apalagi Pak, di daerah-daerah itu paling parah, kita semua satu dunia mungkin tahu disana Pak semua anak bayi tahu bahwa kabupaten A begini begini begini begini, eh WTP juga. Padahal hutang yang tidak tercatat sampai ada kasus dan sebagainya sebagainya masih aja dapat WTP. Di daerah saya Pak ada potensi-potensi kebocoran anggaran ada aset daerah yang tidak tercatat. Selama bertahun-tahun sudah padahal aset ini produktif, tapi itu juga tidak mendapat sorotan dari BPK, aneh juga itu. Ya walaupun dapat sorotan dari auditornya biasanya anggotanya kaya anu kaya buta atau kaya tuli begitu. Makanya saya berharap kedepannya Anggota BPK ini lebih bijaksana bisa memahami situasi dan sama-sama kita melaksanakan tugas kita dengan berkoordinasi sesama mitra. Kedepannya saya himbau kepada teman-teman Anggota Komisi XI maju saja semua lima orang ini yang akan diganti kita maju semua Pak, maju saja jadi Anggota BPK saya akan pilih pasti, saya pilih pasti. Makanya kalau ada Anggota Komisi XI yang maju saya pasti akan pilih. Ya makanya nyalon dong, ya saya himbau makanya, ini supaya apa supaya ada saling pengertian.

Secara psikologis ada saling pengertian terhadap kebutuhan-kebutuhan sesama lembaga. Dan itulah makanya sebenarnya pengurangan anggaran yang apa namanya terjadi di BPK ini ini sejatinya Pak, Bapak tentu ingat dari tahun ke tahun saya secara pribadi selalu mendukung bahkan saya paling tidak paling tidak rela kalau anggaran BPK itu dikurangi. Pengawasannya begitu luas, jangkauannya begitu luas, tapi sayang dengan WTP yang terlalu banyak itu saya jadi agak ragu sama BPK ini. Kemudian disini dicatat bahwa ada sekitar pengurangan berapa anggaran sekitar 40 persen ya Pak. Nah anggaran yang dikurangi 40 persen tetapi kinerjanya yang berkurang menjadi 80 persen, boleh dilihat. Ya coba kita baca, saya ngga tahu bagaimana penjelasannya, ya sekitar 82 persen target capaian yang akan di yang dicapai dengan anggaran yang terpotong 40 persen ini. Ini juga mungkin perlu dijelaskan dari sisi mananya begitu. Nah sehingga ketika misalnya kami memperjuangkan agar anggaran BPK ini tetap dipertahankan sesuai dengan usulannya kita juga ini memiliki argumentasi yang kami yakini bahwa BPK ini betul-betul bisa melaksanakan secara efektif.

Saya kira itu Pimpinan, demikian eh BPS no comend BPS lah. Ya ...

*Wassalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

Waduh kalau Haerul ngomong kita banyak mencatat jadi, Insha Allah kita doakan. Masih ada Bu, sabar. Sebelah kana Ibu Elviana silakan.

## **F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

**Terima kasih Pimpinan.**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Bapak Pimpinan, Bapak Ibu Anggota Komisi XI yang saya hormati.**

**Bapak atau yang mewakili, Kepala LKPP, Kepala BPKP, Sekjen BPK, Kepala BPS dan seluruh jajaran yang juga saya hormati.**

Terima kasih atas materinya, ada yang bahannya gampang dibaca karena memang saya belum pakai kacamata, tapi untuk bahan BPK ini saya tadi gini gini gini, kecil sekali Pak, hemat sekali bahannya. Nanti di ruangan kami juga ini termasuk yang di sortir-sortir sama staff ini, karena bentuknya tidak, nda kerenlah, kaya BPS misalnya kan, jadi disusun-susun di ruang kita juga bagus, nanti diperbaiki ya Pak. Kita akan ada konsinyering kan Pak Pimpinan setelah ini untuk pendalaman, oke. Karena akan ada konsinyering saya pesan saja Pak itu tidak boleh ada satuan tiga itu hanya menuliskan angkanya, tetapi per programnya Bapak mau lakukan apa itu wajib diberitahu ke DPR. Misal LKPP dari empat mitra ini yang sekali ketemu setahun itu memang dengan LKPP ya, sekali Bapak minta persetujuan anggaran, nah sekarang apalagi, LKPP ini. Apa modelnya Pimpinan ini membuat kita bisa berkomunikasi bisa saling kontrol gitu. Misalnya Pak, ada ngga misalnya anggaran ini juga digunakan untuk pembekalan ke pemerintahan daerah, bagaimana cara mengakses, mengetahui atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat oleh LKPP misalnya. Jadi anggaran yang Bapak ... rupiahnya ini di lapangan seperti apa ini penggunaannya. Saya pernah sama Pak Agus waktu wanti-wanti mengatakan beliau belum berhasil membuat semua kementerian itu, apa istilahnya itu Pak, pokoknya barang-barang itu ada harganya gitu, katalognya gitu. Sampai sekarang belum tahu berapa kementerian yang sudah dan berapa kementerian yang belum. Dulu janjinya ke kita tahun 2020 ini clear semua kementerian. Untuk menghindari kementerian dengan seenaknya mengarahkan kampus-kampus membeli barang-barang seperti komputer dengan spek begini begini. Sampai satu komputer itu harganya 35 juta misalnya. Lalu ketika dicek ternyata memang Kemenristekdikti waktu itu belum memiliki daftar e-katalog itu.

Kemudian kembali ke BPK. Pak Sekjen setelah anggaran Bapak disahkan, saya berkali-kali mengalami hubungan yang tidak baik. Untuk apa kita syahkan kita setuju disini misalnya kita dukung agar BPK ini lebih dikenal kita buat acara misalnya BPK goes to kampus. Ketika kita minta penjadwalan terutama masa-masa kampanye kemarin macam-macam alasannya. Tidak ada narasumber yang siap, tidak ada yang ini, lalu saya bilang emangnya lo siapa gue siapa, itu kan padahan anggarannya kita syahkan pertemanan bukan main mesranya pas acara-acara kaya gini. Tetapi kalau sudah jalan Bapak seperti lari ditelan bumi. Jadi itu diperbaiki Pak, karena saya sudah jadwalkan

waktu itu di Universitas Jambi dan di UIN Jambi. Ketemu Rektornya Bu Elvi kapan itu goes to kampus biar mahasiswa kita makin kenal sama BPK, oh ada Pak saya bilang. Minggu depan dua minggu lagi lah. Saya telepon itu macam-macam, saya ngga perlu lah kepala-kepala itu Anggota-Anggota itu yang hadir, yang penting ada acaranya gitu. Staft-staft saja ... BPK goes to kampus hadir orang ngumpul-ngumpul di Jambi apalagi masa-masa kampanye kemarin, itu kami yang penting Pak. Materinya apapun ngga penting itu, untuk lolos lagi. Tapi sedih dengan BPK, serasa ngga ada hubungan gitu, Pak kami pantang ngemis itu Pak. Sama dengan apa lembaga kita LPS ya, bukan LPS, dan bisa nanti bisanya setelah kampanye, oh nda usah, setelah kampanye nda penting lagi pertemuan.

Disitu yang dimaksud Haerul tadi Pak saling pengertian. Jadi saya minta Bapak Sekjen kepada staft-staftnya itu diperbaiki Pak. Ke BPS Pak, saya pikir Bapak pak kepala penting meningkatkan anggaran untuk proses Pak. Proses bagaimana data yang diambil itu benar-benar data yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya berkali-kali kemarin ikut menghadiri Diklat terhadap calon-calon pengambil data Susenas itu. Kayanya mereka perlu dikasih pakaian khusus deh Pak, ada kan pengadaan untuk itu. Kalau sebatas yang dikantong di leher itu, itu mereka diusir-usir Pak, masyarakat nda percaya kalau dia pengambil data gitu, berapalah harganya. Apa perlu kalau menghemat rompi saja Pak. Rompi nanti bertukar staftnya Bapak pindahkan lagi ke yang lain gitu, kalau sebegitu mahalunya. Jadi saya pikir teman-teman petugas Susenas ini perlu diberi identitas Pak. Dan jika memang mereka bagus, kenapa Bapak tak mencoba membuat mereka menjadi bagian dari petugas PPPK itu Pak, pegawai kontrak itu, biar mereka termotivasi. Bapak sudah capai mendiklatkan, tetapi begitu ada tawaran kerjanya lebih bagus mereka akan pindah ke pekerjaan lain. Nah dari nol lagi Pak Kepala mendidik terhadap teman-teman petugas Susenas itu. Mungkin yang sudah enam atau sepuluh tahun ikut menjadi petugas Bapak usulkan ke Menpan RB menjadi petugas honorer seperti guru, macam-macam Pak hampir semua lembaga sekarang berlomba-lomba mensejahterakan orang-orang yang baik-baik itu. Jadi Bapak tidak kehilangan orang-orang hebat dalam ini.

Itu saja Pimpinan, terima kasih banyak, maaf kalau ada yang salah.

*Wassalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **F-NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Ada lupa, ada lupa sedikit. Kepada Kepala BPKP, Kepala BPKP Pak ya. Ada daerah yang indeks kebahagiaannya paling tinggi di Indonesia. Indeks kebahagiaan tertinggi untuk tiga belas provinsi Indonesia. Tapi kenapa kemiskinan, pengangguran terus terbuka. BPS dengan variabel dan indikator yang terukur seperti apa menetapkan daerah ini sebagai daerah yang indeks kebahagiaannya tertinggi. Saya tidak usah disebut disitu Bapak pasti tahu. Yang kedua Pak terima kasih kinerja implementasi daripada sistem keuangan desa versi dua, posisi sampai dengan tanggal 14 Juni Pak ya kira-kira dua tiga hari kemarin. Dari 74.958 desa Bapak sudah mencapai 77,21 persen atau setara 57.873 desa. Pertanyaan, kenapa Pak sebaran di kawasan Indonesia Timur masih sedikit sekali, itu Pak. Ada yang belum mencapai satu persen.

Apakah ini bukan justifikasi, gitu. Memang Pak ada delapan provinsi di kawasan timur Indonesia dan satu Kepulauan Riau, ini termasuk daerah kepulauan, sehingga barangkali ini *spen of control* tadi menurut BPKP sulit dijangkau, begitu Pak. Ya mudah-mudahan sebelum memasuki periode yang kedua Pak Jokowi sebagai Presiden yang tersisa ini Bapak bisa rampungkan.

Saya coret-corek disini Pak, yang ada merah ini kawasan timur Indonesia seperti Papua belum sampai satu persen, sosialisasi ini Pak. Ada satu lagi Pak, tapi Insha Allah nanti kita akan pertanyakan ini kepada Ibu Menteri Keuangan. Ada satu program dengan kegiatan yang ini memiliki korelasi dengan PMK Menteri Keuangan Nomor 611 tanggal, tahunnya 2018. Ada satu disini program unggulan dengan kegiatan ada beberapa, tapi satu kegiatan diantaranya adalah pembangunan BPK di Kalimantan Utara, Gorontalo, dan satu lagi Maluku Utara. Saya mau tanya Bapak, Kantor BPK Maluku Utara ada apa, bencana bandang atau rusak sama sekali. Kantor BPKP Perwakilan Maluku Utara, ada didalam sini Pak, Gorontalo, Kalimantan Utara, Maluku Utara, apa yang rusak Kantor BPKP Maluku Utara. Wong saya sehari-hari lewat situ, begitu Pak. Tapi ini kalau nanti Pak di Veto oleh Ibu Menteri kita nanti tanya karena ini terkait yang kemarin pembangunan Gedung Bappenas Ibu ini mengeluarkan PMK Nomor 611 tahun 2018, seperti ya mungkin kita maknai seperti tunggu dulu moratorium, kira-kira begitu Pak. Dan ini untuk BPKP, ini sudah hampir setiap tahun muncul Pak, setiap tahun muncul ini. Ya pagu indikatif tahun 2020 ini ada satu program, programnya dukungan management ada satu koma sekian triliun Pak ya. Kemudian belanja aparatur sipil negara ini sudah memakan kurang-lebih 71 persen. Terus berapa lagi dukungan pengawasan, kurang-lebih 5 persen. Ya kalau dukungan pengawasan dari dana sebesar ini hanya 5 persen bagaimana kita mengharapkan dana desa ini semuanya diperiksa, sampai dengan akhir masa jabatan pertama Presiden Jokowi. Sementara yang sekarang disebut Pak termiskin, tertinggal, terluar, Bapak belum sampai kesitu, sekali-sekali coba Pak sampai kesana, mudah-mudahan Bapak bisa kembali, tiga T sekarang. Penyelesaian pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Bangka Belitung. Pembangunan tahap pertama Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dan Maluku Utara.

*Wassalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh .*

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Satu, ijin ya.

**KETUA RAPAT:**

Habis ini,



**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Pak, sebentar nanti kalau

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Sekjen.

**F-NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):**

Siapa, saya?

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F-NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):**

Pak, Pak siapa namanya, Pak calon Pimpinan Komisi XI.

**Terima kasih Pimpinan.**

**Rekan-rekan Anggota dan mitra kerja yang saya hormati.**

Yang pertama ya, saya hanya mau nanya ya saya sendiri tidak terlalu jelas penafiran terhadap Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK ini. Apakah penerimaan negara juga menjadi objek pemeriksaan BPK atau tidak. Kalau iya ya, apa pemeriksaan BPK terhadap penerimaan negara selama ini apakah ada itu. Kan saya dengar Kementerian Keuangan dapat predikat WTP. Apakah juga disitu termasuk WTP terhadap penerimaan negara. Kalau dibaca di undang-undang maka penafsiran itu disitu kan disampaikan BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan itu penerimaan negara, keuangan negara itu penerimaan negara dan belanja negara. Tadi kita berbicara ini lebih banyak hefi atau tekanannya kepada belanja negara. Termasuk LKPP tadi ngomong dua ribu empat ratus sekian triliun itu belanja negara yang diomongin. Siapa yang ngurus yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penerimaan negara, baik pajak bukan pajak maupun defisit atau pembiayaan pemerintah. Nah ini tolong disampaikan kepada Anggota-Anggota BPK untuk melihat itu dengan betul ini. Kalau memang itu sudah dilakukan saya juga ingin dengar ini bagaimana evaluasi dan pengawasan terhadap penerimaan negara oleh BPK. Tidak hanya dilihat target versus realisasi saja tapi kualitas penerimaan negara ini bagaimana ini. Ya ini mohon ini ya agak keluar dari urusan budget sedikit tapi saya ingin ingatkan, saya terprovokasi sama Pak Heri tadi.

Yang kedua ya, saya sih setuju sekali ya dalam rangka peningkatan kinerja diukur dari besarnya belanja negara termasuk oleh mitra kerja mitra kerja ini. Hari ini banyak komplain dan komplainnya saya kira seragam ini, ya seragam minta tambahan karena dipotong. Kan itu kira-kira hampir semua seragam saya ngga tahu apakah berunding dulu atau memang kebetulan sampai disini angka keluarnya begitu ya, atau bagi kita, tadi Bu Elvi juga bilang itu walaupun satuan tiga tidak menjadi kewenangan kita tetapi banyak harus

disisir secara detail, begitu. Ya terkait dengan produktifitas dan efisiensi penyelenggaraan negara dari semua mitra kerja kita ini. Ujungnya memang angka akhirnya sekian totalnya tapi didalamnya efisiensi dan produktifitas seperti apa. Satu pemeriksaan yang bisa dilakukan dalam lima jam dilakukan dalam dua puluh jam inefisien itu, ... (suara tidak jelas) menawarnya jalan terus. Ini juga barangkali perlu kita lihat. Saya ingin ingatkan saja kepada pemerintah dalam hal ini mitra kerja kita ya. Insentif perpajakan kita, belanja perpajakan kita insentif itu 150 triliun setahun. Tax holiday hampir 150 triliun, 149, dua itu saja sudah 300 triliun. Itu belanja yang tidak diterima oleh negara, kan itu belanja artinya. Kalau kita mau naik-naik boleh-boleh saja, sejauh penerimaan negara kita cukup. Belum lagi ya, penerimaan pajak non pajak kita walaupun setiap tahun naik ya tapi belum cukup juga untuk membiayai kebutuhan negara ini. Itu terwujud darimana, dari memang postur APBN kita defisit kok, defisit budget policy. Walaupun defisit kita yang saat ini dilakukan begitu prudent atau begitu berhati-hati ya. Sekarang ini dibawah dua persen GDP, atau dengan kata lain kita berhutang yang disetujui oleh seluruh fraksi di DPR RI ini bersama pemerintah, tapi kita ribut tentang hutang disini. Hutang hutang hutang terus tapi ingin belanja naik belanja naik belanja naik, ya bayar pajak yang banyaklah kalau mau pajak naik, tax ratio kita juga. Tax ratio kita digambarkan baru 11,4 persen. Kalau ditambah dengan penerimaan daerah ya, dia menjadi sekitar 13,4 persen. Nah jangan saja melihat satu dua hutang jadi momok semuanya tapi tidak lihat secara menyeluruh kalau penerimaan negara kita luar biasa besarnya yang pertama kita potong apa, yang pertama kita potong dari defisit budget menjadi balance budget, dari postur defisit menjadi postur balance, seimbang postur seimbang. Kalau sudah seimbang naikan belanjanya ya dengan itu diharapkan juga naik juga efektifitas dan efisiensi dan produktifitasnya, itu kita harapkan begitu. Jadi pada perinsipnya ya kita tentu berharap pengelolaan tidak saja BPK, BPKP, LKPP ya khususnya bertiga ini kan berurusan dengan kinerja efisiensi dan produktifitas, kan itu urusannya.

Coba sekali-sekali melitah kedalam di tempat kita sendiri sudah terjadi ngga efisiensi dan produktifitas itu. Kalau di tempat kita sendiri belum terjadi efisiensi dan produktifitas bagaimana kita melihat efisiensi dan produktifitas di lembaga negara lainnya, atau pemangku-pemangku anggaran lainnya. Itu juga anu, dari sisi anggarannya apa namanya eh apa istilahnya disini ini, ini pagu dari sisi pagu ya pagu indikatif sekalipun tolong bicarakan dengan Kementerian Keuangan. Ya karena ini hanya bisa dibicarakan disini setelah Kementerian Keuangan menyetujuinya. Seingat pengetahuan kita memang ada pemangkasan base linanya base line mundur ini untuk rangka dalam rangka apa tadi efisiensi dan produktifitas. Mundur ini sudah peningkatan untuk kenaikan luar biasa ini 2016, 2017, 2018, 2019 itu seperti take off Pak. Biaya juga naik terus semuanya. Apakah sejalan dengan peningkatan take off efisiensi dan produktifitas, ngga ada yang tahu juga, yang keluar WTP-WTP banyak itu administratif Pak, itu kan administratif itu. Nah makanya pemerintah pasti minta baliklah ke base line sebelumnya, naik naik naik mana hasilnya apa gitu. Nah kalau dari sisi itu saya dapat pahami, kalau base linanya tahun 2015 ya anggaran pangkaslah semuanya, termasuk yang di sini, pangkas untuk kembali kita lihat secara dalam disisir baik-baik dimana efisiensi dan produktifitas itu bisa dilakukan. Ini saya bukan Menteri Keuangan ini tapi belum mau ingin melihat dalam rangka pengelolaan keuangan negara gitu loh, supaya

kita pas-pas untuk melihatnya jangan sampai nanti di satu sisi kita minta anggaran naik di sisi yang lain kita setuju anggaran tapi kita teriak hutang-hutang tidak ngomong soal secara proporsional bagaimana postur penerimaan dan belanja negara kita. Kalau memang ini ada kelenturan pembiayaan yang memungkinkan penerimaan negara itu yang tidak saja belanja personil belanja konsumsi saja tapi juga bisa diimbangi dengan peningkatan belanja-belanja modal atau harta negara yang nanti bisa menghasilkan penerimaan negara sebagai ritern dari investasi negara itu boleh-boleh saja.

Sepengetahuan kita kalau kita evaluasi juga secara menyeluruh ya dari APBN berapa besar itu belanja personil atau yang terkait dengan personil, gede sekali Pak, untuk membiayai berapa juta ini penyelenggara negara ini, besar sekali. Sampai belanja-belanja yang terkait dengan investasi negara sangat terbatas Pak. Nah ini juga secara keseluruhan perlu kita lihat bersama-sama ya. Secara prinsipnya saya Cuma berharap saya tidak mau lihat angka-angkanya ya, angka-angka nanti silakan berunding, tapi harapan kita satu skup dari Tupoksi kita masing-masing termasuk BPK apakah lingkup yang terkait dengan penerimaan negara sudah pernah menjadi perhatian BPK atau belum. Untuk bersama-sama kita membuat supaya penerimaan negara kita semakin lebih akuntabel dan semakin lebih baik. Dari sisi pengelolaan bendahara negara sudah terlihat usaha pemerintah yang secara sungguh-sungguh ya untuk membuat APBN yang berkualitas itu. Itu terlihat ya hutang kita dikendalikan dengan baik management hutang kita dikendalikan dengan baik dengan prudent ya keseimbangan primer kita diharapkan kali ini semakin kecil negatifnya, defisitnya makin kecil bahkan diharapkan tahun ini menjadi nol atau positif ya. Keseimbangan primer itu memberikan gambaran tatakelola postur APBN atau APBN kita semakin lebih baik secara keseluruhan, tapi secara detail ada di Bapak-Bapak ya yang sampai satuan tiga.

Yang kedua ya, LKPP sama BPKP ya secara khusus ini. Tadi menyambung rekan saya dari Maluku. Saya secara khusus juga minta ya asistensi yang sungguh-sungguh dan terfokus ya oleh LKPP dan BPKP untuk 75.000 desa di Indonesia ini. Kita ingin mereka untuk tidak buat salah, karenanya mereka harus diberikan asistensi secara khusus supaya berbuat benar, karena itu garis depan Pak. Belanja disitu langsung berurusan dengan rakyat langsung di desa-desa, di kampung-kampung kelompok-kelompok marginal yang ada di republik kita ini. Jumlahnya tidak besar Cuma puluhan triliun setiap tahun dibandingkan dengan keseluruhan postur APBN kita, tapi itu menyentuh ratusan juta rakyat kita. Karena saya dengan secara khusus minta supaya BPKP dan LKPP berikan asistensi mereka agar berani menggunakan dan menyerap anggarannya agar menyerap anggarannya dengan benar, sehingga stimulus itu langsung ada di kampung-kampung di desa-desa di seluruh Indonesia. Secara khusus saya juga minta disini untuk perhatikan di Nusa Tenggara Timur. Ya secara khusus ini LKPP dan BPKP untuk perhatikan memberikan asistensi kepada mereka, karena ini menyentuh langsung. Duitnya ngga gede tapi tersebar dan dirasakan langsung oleh rakyat. Apalagi kalau ada sinyalemen-sinyalemen tadi ada sebagian dana desa itu yang tidak digunakan sesuai peruntukannya, tolong bantu mereka.

Sepengetahuan dari cara penyaluran dana desa dari Kementerian Keuangan itu sudah diatur untuk menghindari intervensi-intervensi yang tidak perlu terhadap desa. Tapi kalau masih itu terjadi ya tentu disinilah LKPP dan

BPKP untuk membantunya. Nah ini yang terakhir barangkali BPS Pak ya, dari dulu ini BPS ini selalu ini terkait dengan perlindungan sosial. Program perlindungan sosial kita dari waktu ke waktu semakin besar Pak dan sangat besar, ya ratusan triliun perlindungan sosial. Ini terkait dengan rakyat kecil semuanya dalam rangka keadilan sosial, dalam keadilan ekonomi. Pendataan dari BPS dan kementerian teknis terkait apakah itu Kementerian Sosial misalnya tolong disinkronkan, agar penerima-penerima bantuan itu tepat orangnya, tepat tempatnya dan tepat waktunya serta tepat jumlahnya. Kadang-kadang orangnya salah Pak, sampai di desa itu orang yang dapat apapun namanya PKH kah atau apapun ya BPJS, Indonesia sehat, Indonesia pintar dan seterusnya. Bisa saja orangnya salah, karena tidak diberikan pendataan yang akurat. Dan ini mengakibatkan kecemburuan sosial di lingkungan terkecil masyarakat di desa di kampung-kampung, di sekolah-sekolah, di rumah sakit atau di pusat-pusat kesehatan masyarakat.

Ini minta tolong betul-betul itu diperhatikan, sinkronisasi dengan BPS. Dan tahun 2020 akan dilakukan apa namanya sensus penduduk, ya kan ini dianggarkan disini 4 triliun sensus penduduk. Setiap siklus sepuluh tahunan kita melakukan atau siklus tahun nol kita melakukan sensus penduduk. Dan kali ini tahun 2020, sampai dengan tahun 2030 lagi baru dilakukan sensus lagi. Dan itu akan menjadi acuan selama sepuluh tahun kedepan. Akan menjadi acuan pendataan penduduk sepuluh tahun kedepan. Minta tolong sensus ini dilakukan secara akuntabel Pak, tidak saja prosesnya tapi hasilnya dengan standard bias yang kecil gitu. Jangan sampai nanti, saat ini nanti kita ingin tahu ini berapa besar penduduk kita itu, kan sensus penduduk memang jumlah penduduk laki-lakinya berapa perempuannya berapa kira-kira begitu. Tersebar di desa-desa mana, ya dibawah administrasi pemerintahan yang mana, pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten mulai ada pemisahan kewenangannya. Dari pemerintahan desa mulai ada pemisahan kewenangan, penduduk di desa mana saja ini terkait dengan dana desa untuk APBN setiap tahun. Pemerintahan kabupaten juga ya lintas kabupaten itu data kependudukan di perbatasan-perbatasan itu bisa terjadi over laping bisa double counting, atau bisa bahkan tidak terdata, karena sengketa wilayah perbatasan juga besar di Indonesia ini diantara kabupaten-kabupaten. Lintas provinsi pun demikian. Ya kita minta tolong pendataan itu dilakukan dengan betul-betul akuntabel dan benar. Inilah saatnya dan baru dilakukan lagi sepuluh tahun kemudian. Nah sepanjang sepuluh tahun atau dua periode pemerintahan kita melakukan semua kebijakan negara setidaknya berbasis data BPS.

Bagaimana BPS ini supaya memberikan akurasi atau data yang betul-betul bisa menjadi acuan terpercaya ya yang kredibel didalam semua kebijakan negara. Dan terakhir BPS ya ada perkembangan dunia yang bergeser ke new nexus itu ya, apa big data dan seterusnya itu menjadi satu potensi bisnis yang besar di masa akan datang, di masa yang akan datang. Dan big data kita harusnya berasal dan pusat tersentralisir dari BPS. Dan BPS perlu menyiapkan diri untuk pengelolaan big data kita untuk kepentingan masa depan, apa saja yang terjadi yang terkait dengan kebijakan publik, baik itu kebijakan negara maupun kebijakan korporasi yang terkait atau ruang lingkup yang besar ya.

Saya kira itu Pimpinan secara umum, secara budget saya kira ya kita setuju dan percayai ini dikelola dengan baik. Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya ceramah tujuh menit dari Sekjen Partai Nasdem. Kayanya Menteri Bappenas cocok Pak ya, merencanakan pembangunan nasional. Itu doa loh teman itu. Baik kita lanjut Ibu Tutik ya, silakan.

**F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M., M.Kes.):**

**Terima kasih Pimpinan atas waktunya.  
Pimpinan Komisi XI dan Anggota Komisi XI yang saya hormati,  
Bapak-Bapak Ibu-Ibu mitra kerja Komisi XI yang saya hormati pula.**

Tadi kami semua telah mendengarkan bahwa empat lembaga ini dalam presentasinya mengenai visi dan misi tentu sangat bagus sekali, dan saya sangat apresiasi. Namun masih ada kami melihat adanya kinerja yang kurang bersinergi. Tentu disini mungkin saya tunjuk langsung BPK, BPKP disini tidak adanya saling komunikasi, koordinasi ataupun saling mengingatkan. Padahal kan ini sama-sama badan pemeriksa dan pengawas terhadap akuntabilitas keuangan negara. Jadi tadi kalau menyampaikan bahwa yang diperiksa adalah kinerja. Berarti kalau kinerjanya tidak bagus itu kan juga nanti cenderung untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Nah disini tiga lembaga ini LKPP, BPKP, BPK sangat powerful sebenarnya. Kalau saja dalam tugasnya yaitu didalam pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang bisa berjalan dengan baik. Disini saya ingin bertanya kepada BPKP, BPKP selaku auditor internal. Tadi disampaikan sebagai pendampingan. Nah ini kalau melihat umpamanya ada kejanggalan tentang penyalahgunaan wewenang. Yang saya tanyakan apakah keuangan desa itu boleh untuk membeli mobil. Mobil operasional yang jenisnya Expander. Ini ada di satu kabupaten di Bali di Gianyar 64 desa itu jejer di lapangan ya, pada waktu penyerahan kepada kepala desa jejer di lapangan. Sementara rakyat semua bengong melihat yang jalannya masih rusak. Nah inilah yang saya maksud kinerja yang belum bersinergi sehingga tidak bisa saling komunikasi bagaimana mengingatkan sih kalau mau bekerja yang baik itu. Kalau rakyatnya mungkin sudah sesejahtera Singapura mungkin mereka diam ngga ada menyampaikan ke kami di DPR. Ini rakyatnya masih anu Pak, masih kesejahteraannya belum secara signifikan, belum berkeadilan. Jadi itulah yang disampaikan Pak. Mereka beli mobil Expander 64 desa Pak. Nah ini coba saya pingin tanya apakah itu sudah sejijn BPKP karena konon BPKP menyetujui.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Masih ada, Pak Ref. Baik silakan habis ini Bu Elvi menambahkan. Habis itu kita sepakati lima belas menit lagi lah kita selesai.

**F-NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Pak Sekjen ada ya. Pertanyaan saja. Tahun depan ini ada 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak, begitu Pak Sekjen ya. Di Dapil

saya terdapat ada beberapa tapi yang paling menonjol satu Kabupaten Taliabo. Dua tahun yang lalu ketika kunjungan kerja spesifik Komisi XI di kantor gubernur, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara dengan seluruh jajarannya telah memvisualisasikan kejadian itu kepada Komisi XI bahwa dana desa untuk tahun pertama Kabupaten Taliabo seluruhnya untuk kepentingan politik, dan yang bersangkutan menjadi bupati. Kenapa tidak disentuh sampai hari ini, sementara tahun depan dia ikut bupati lagi dan dia akan hajar lagi dana desa tahun depan, dimana ada BPK. Apa BPK perwakilan di Maluku Utara sudah ngga ada lagi, satu. Juga ada Kabupaten Halmahera Selatan dan kabupaten-kabupaten yang lain. Kasihan ini Pak. kami ini Pak setiap reses ngga pernah tinggal di Ternate jadi ngga ada Pak. Masuk keluar kampung orang-orang yang ngga punya. Jangan naik pesawat lihat pesawat seperti apa pun mereka ngga tahu. Itu tadi saya mengatakan tiga T (Termiskin, Terluar dan Terpinggirkan) kasihan mereka juga adalah bagian dari anak bangsa. Yang terakhir dari saya Pak Sekjen minta maaf, pertanyaan bagi kami. Ketika tahun pertama atau setelah dua belas tahun kita merdeka kita telah mendapat predikat terhormat dari BPK yaitu wajar tanpa pengecualian, dua belas tahun lamanya Pak. didalam WTP itu terdapat delapan kementerian lembaga yang secara standard akuntansi pengungkapan data sistem pengendalian internal termasuk kepatuhan diabaikan oleh delapan kementerian lembaga. Sejauh mana Pak tindak-lanjut daripada BPK. Komisi XI perlu tahu Pak, karena delapan kementerian lembaga itu sangat meterial Pak. Kalau empat item ini tidak terpenuhi satupun. Kemarin WTP lagi 2017. Ada dua kementerian lembaga yang kacau balau juga, jadi sudah total sepuluh ini Pak. Kami Komisi XI perlu mendapat gambaran. Tidak mungkin Pak, beberapa waktu yang lalu diserahkan IHPS. Kami tidak punya waktu untuk satu lembar satu lembar satu lembar membaca itu. Jadi tolong BPK menginformasikan kepada kami bahwa setelah tindak-lanjut inilah warnanya.

Terima kasih Pak.

*Wassalamu,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Silakan Bu Elvi mau menambahkan sebelum diserahkan ke pemerintah.

#### **F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

#### **Terima kasih Pimpinan.**

Pak Sekjen BPKP saya mau usul Pak soal Diklat-Diklat yang dilaksanakan untuk Kades itu sangat bermanfaat ya. Hanya saja kalau, harus ada pengelompokan gitu Pak. Ada Kades itu kan masa jabatannya kan enam tahun Pak. Ada yang dua belas tahun, sepuluh tahun jadi Kades. Lalu ketika dicampurkan mereka dengan Kades yang baru diangkat dua tahun setahun jadi kepala desa itu biasanya yang lama-lama ini mengganggu. Berkali-kali kita Diklat karena bagi mereka itu sudah sering mendapat itu ke itu saja, mereka merokok-rokok di luar lalu saya tanya kok di luar Pak Kades, ah itu ke itu saja materinya Bu Elviana gitu. Jadi harus ada Diklat khusus bagi kepala desa yang

baru masa jabatannya dibawah lima tahun, agar yang Bapak buat itu benar-benar bermanfaat.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Baik, sudah semua memberikan pertanyaan, tinggal kita dijawab secara konperhensif oleh Sekjen BPK, kemudian berlanjut kalau ada pertanyaan ke BPKP, LKPP maupun BPS. Setelah itu kita menyimpulkan hasil paparan ini. Waktu dan tempat kami silakan.

### **SEKJEN BPK RI:**

Terima kasih Pimpinan dan terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak-Bapak Anggota Komisi XI. Pertama untuk berbagai masukan ataupun usulan dalam proses penganggaran pembahasan terdahulu sebelum pagu indikatif nanti kami tindaklanjuti untuk dibicarakan kemudian. Termasuk rincian dari kegiatan atau program di satuan tiga juga akan kami apa namanya tindaklanjuti dengan nanti pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan juga untuk usulan-usulan apakah pemeriksaan di beberapa daerah khususnya untuk dana desa. Sebagian sudah ada diperiksa sebagian ada yang belum, tetapi yang jelas untuk pengembangan berikutnya barangkali kami mengusulkan untuk ada pertemuan konsultatif antara BPK dan dengan Komisi XI dan termasuk BAKN. Demikian juga tadi masukan terkait dengan pendampingan dalam kunjungan di daerah baik BAKN maupun Komisi XI termasuk program-program sosialisasi menjadi perhatian kami untuk terus diperbaiki kedepan. Untuk pemeriksaan terkait dengan penerimaan negara setiap tahun dilaksanakan BPK didalam proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat termasuk kementerian negara lembaga. Penerimaan negara bukan bagian dari lingkup pemeriksaan karena juga dilaporkan oleh pemerintah pertanggungjawabannya realisasi APBN untuk pendapatan negara baik penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak. Dan hasil tindak-lanjut penerimaan negara tersebut juga bisa dilihat dampaknya terkait dengan kenaikan PNBP. Demikian juga untuk bagaimana opini WTP tetapi masih banyak persoalan-persoalan pengendalian intern maupun kepatuhan barangkali nanti bisa ditindaklanjuti melalui *focus group discussion* atau rapat konsultatif sehingga bisa pembahasan lebih dalam, karena memang ini sangat detail. Nanti apakah temuan-temuan tersebut berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan kesesuaiannya dengan standard akuntansi atau tidak.

Dan demikian juga pertanyaan terkait dengan tindak-lanjut betul Pak nanti kami akan melaporkan terus dan dalam LHP juga kami laporkan, tapi memang detailnya perlu dibahas dalam pertemuan konsultatif barangkali. Kami mengusulkan nanti hal-hal yang detail apakah melalui pertemuan konsultatif ataupun *focus group discussion* sehingga secara detail bisa dilihat. Kalau di ...(suara tidak jelas) memang gambarannya gambaran umum, detailnya mungkin ada di data kami sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut. Kemudian untuk efisiensi dan produktifitas juga menjadi perhatian nanti kami akan lihat kembali bagaimana anggaran ini bisa dijalankan secara efisien dan output dari anggaran ini bisa maksimal. Demikian juga terkait dengan anggaran

BPK yang secara nilai turun 40 persen tetapi secara output hampir 80 persen karena turunnya anggaran ini paling banyak terkait dengan output LHP. Dan LHP setiap jenis LHP itu berbeda-beda standard costnya, sehingga kalau dilihat dari 2.894 LHP terkait dengan pemeriksaan bantuan Parpol ini kecil-kecil tapi banyak. Sementara kalau LHP yang besar ini terkait dengan laporan keuangan, kinerja dengan tujuan tertentu standard costnya biasanya satu jenis atau satu unit LHP itu tinggi, tapi untuk bantuan Parpol ini biasanya walaupun banyak tapi costnya kecil-kecil karena baik di pusat maupun di perwakilan untuk bantuan Parpol baik di kantor pusat partai maupun di perwakilan-perwakilan dari daerah.

Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih atas berbagai masukan dan mohon dukungan untuk usulan kami atas tambahan anggaran.

Terima kasih

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik silakan dari BPKP.

#### **KEPALA BPKP:**

Terima kasih Pimpinan Komisi XI yang terhormat. Bapak Ibu sekalian tadi terima kasih juga Pak kami sampaikan atas dukungan dari Bapak-Bapak semua atas doa pengajuan kami, Insha Allah mudah-mudahan ini diteruskan dan menjadi dukungan kami. Sedikit penjelasan barangkali terkait dengan apa yang disampaikan Pak Hatari Pak. Kantor perwakilan kami di Maluku Utara memang itu kantor tumbuh Pak. Dulu itu kantor Mes sebetulnya kemudian dikembangkan sekarang sudah tidak menampung lagi jumlah pegawai yang ada, sehingga kami dan sudah mendapat hibah dari Pemprov untuk pindah ke Sovivi Pak. Jadi ini untuk membangun nanti di Sovivi. Jadi mudah-mudahan ini bisa direalisasikan tahun depan Pak sebagian 2020 dan 2021. Terima kasih atas dukungan Pak Hatari. Kemudian terkait dengan mungkin pengawasan tadi Pak Hatari juga dan Bapak Ibu sekalian, untuk dukungan pengawasan itu bukan untuk yang ke lapangan Pak, ini dukungan pengawasan di back office. Untuk pengawasan sendiri yang ke lapangan itu sekitar 50 persen di perwakilan dan 25 persen di pusat dan di kedepujian. Jadi secara total sekitar 75 persen dari anggaran pengawasan 400 milyar itu ke lapangan. Jadi tadi untuk mendukung ke peningkatan kapabilitas ataupun akuntabilitas di desa itu sudah bukan tercakup di dukungan pengawasan Pak, tapi di aspek nol enam. Untuk 2020 kami coba mengalokasikan sekitar 19 milyar Pak. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh seluruh Indonesia.

Terkait dengan tadi terima kasih arahan Pak Hatari juga masukan untuk yang sisa-sisa yang belum kami sentuh barangkali di semester ini semester dua kami teman-teman di perwakilan kami kerahkan untuk itu Pak, terima kasih. Kemudian masukan dari Bu Elviana juga terima kasih Bu, kadang-kadang memang untuk upgrading harus perlu dipilah-pilah, terima kasih Bu. Terkait dengan Bu Tutik terakhir terima kasih Bu konsennya Cuma memang itu hanya mungkin mereka beralasan saja tidak ada kapasitas BPKP untuk



menyetujui atau tidak. Karena secara ketentuan di Peraturan Menteri Desa itu ada dua aspek yang harus disalurkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi mungkin ini informasi yang bisa disampaikan. Baik, kami secara implementasi di lapangan kami melaksanakan pengawasan disamping pendampingan-pendampingan untuk, karena memang alokasi itu cukup besar karena kami ingin akuntabilitasnya dijaga dulu kapasitas SDMnya ditingkatkan dulu tapi juga tidak melupakan kami juga melakukan evaluasi tapi secara sampling tidak secara keseluruhan dilakukan. Nah untuk yang kasus-kasus yang tertentu tadi mungkin disampaikan Pak Edison kami setelah kami koordinasi yang cover teman-teman disana sedang menangani dengan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan negeri itu untuk kasus yang dana desa yang sedang ditangani.

Saya kira itu mungkin terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, silakan.

**F-NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Pak saya ditunjuk oleh komisi ini, Pimpinan komisi ini sebagai anggota tetap dari Tim Workshop Dana Desa. BPKP, BPK ada kepolisian untuk di Maluku Utara tinggal satu Kabupaten Pulau Morotai. Kabupaten Pulau Morotai ini Pak lebih dekat ke Flores daripada ke Ternate. Bapak bisa masukan darimana Pak. Apalagi menurut saya ngapain mau workshop disitu. Kita mau workshop dana desa disitupun oleh bupati angin lalu saja. Apalagi ini tahun depan mau ikut Pilkada lagi hajar lagi dana desa untuk tahun akan datang. Jadi itu Pak, apalah Pak. Dan karena itu penekanan didalam forum ini perlu ada tindakan nyata daripada bupati itu supaya jadi contoh bagi yang lain. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik sebagai masukan. Pak BPS silakan.

**KEPALA BPS:**

Terima kasih Bapak Pimpinan, juga Bapak Ibu Anggota Komisi XI yang sudah memberikan masukan. Dari Bu Elviana menyarankan bahwa dalam pelaksanaan survey Susenas idealnya BPS menyediakan anggaran untuk pengadaan seragam, begitu. Saya pikir ini memang sedang kita pikirkan Bu kita memberikan seragam dalam bentuk rompi biasanya kalau kita melakukan sensus karena anggarannya cukup besar. Tetapi karena Susenas itu rutin dan anggarannya agak terbatas memang selama ini kita belum, tetapi akan kita pikirkan bisa ngga kita melakukan efisiensi disana-sini sehingga tidak hanya rompi Bu kalau seragam mungkin kemahalan begitu. Dan usulan Bu Elviana tadi mengenai upaya untuk menjadikan mitra sebagai PPPK saya sudah menindaklanjutinya sekarang kita sudah mengirimkan surat ke Menpan RB

untuk mendapatkan jatah PPPK. Jadi nanti sangat tergantung berapa jumlah yang kita peroleh dan sebarannya tetapi pesannya Bu Elvi tadi bahwa BPS harus mengutamakan mitra-mitra yang terbaik akan kita perhatikan. Saya ngga tahu yang Pak Hatari tadi indeks kebahagiaan buat saya ya Pak ya, oke. Untuk Maluku Utara kebetulan indeks-indeksnya semuanya berjalan seiring. Jadi kalau kita lihat Maluku Utara ini pertumbuhan ekonominya pada triwulan satu 2019 ini jauh diatas nasional bagus, kemiskinannya jauh dibawah nasional hanya 6,62 persen bagus. Gini rasionya bagus, indeks kebahagiaannya tertinggi.

Jadi di Maluku Utara secara umum seluruh indikator berjalan seiring Pak. Ya kemiskinannya rendah, ketimpangannya rendah sehingga kebahagiaannya tinggi. Tetapi kalau kita lihat di beberapa provinsi apa yang dikhawatirkan oleh Pak Hatari tadi betul. Ada beberapa provinsi yang tingkat kemiskinannya tinggi tetapi kebahagiaannya bagus, seolah-olah miskin tetapi bahagia, begitu ya. Jadi ada beberapa kasus seperti itu, perlu disadari bahwa cara pengukuran kebahagiaan sesuatu yang sangat abstrak itu didasarkan pada pengukuran yang lebih bersifat subyektif. Negara-negara lain juga melakukan hal serupa dengan variabel yang berbeda tetapi tiga dimensinya selalu sama. Yang pertama adalah dimensi kepuasan hidup, dari sisi personal, dari sisi sosial. Dari sisi personal misalnya dia akan melihat pendapatan saya cukup ngga, kesehatan saya cukup ngga, kondisi rumah saya bagus atau tidak. Tapi dari sisi sosial bisa saja pendapatan saya itu rendah tetapi karena hubungan sosial saya dengan tetangga bagus sehingga menjadi naik. Kemudian juga ada dimensi perasaan yang kedua adalah makna hidup. Bisa terjadi bahwa orangnya tidak terlalu kaya, sedang-sedang saja atau cenderung miskin tetapi dia masih mempunyai kesempatan diterima oleh lingkungan, itu dari sisi perasaan dia akan mengungkapkan dia bahagia, itu yang menyebabkannya. Jadi kebahagiaan memang relatif dan itu terjadi hampir di semua negara Pak, di Butan, dimanapun. Meskipun variabel beda dimensinya itu tadi karena lebih subyektif sehingga kadang-kadang ada yang tidak sinkron seolah-olah. Jadi mungkin kebahagiaan tidak harus diukur hanya dari materi saja BapK. Dari tiga dimensi tadi saya pikir lumayan komplit. Tapi kedepan saya sadar bahwa untuk mengukur kebahagiaan itu tidak gampang, dan kita di komisi statistik PBB selalu mereview dari waktu ke waktu.

Untuk Pak Johnny Plate tiga pertanyaan tetapi sebetulnya lebih kepada saran mengenai yang big data tadi saya sampaikan bahwa minggu lalu BPS menjadi host untuk Regional Workshop Asia Pasifik untuk mobile positioning data yang sebetulnya merupakan big data. Salah satu alasannya karena BPS dianggap kemajuannya menggunakan big data termasuk yang paling bagus, karena itu dipilih disana. Karena kita menyadari bahwa misalnya dengan adanya e-comers, online dan sebagainya itu harus ditangkap. Tetapi kedepan memang harus ... perlu kita tingkatkan lagi.

Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Dari BPS, indeks kemiskinan Pak, tertinggi Pak indeks kebahagiaan

paling tinggi di Indonesia. Pertanyaan, begitu Kopra harga turun ribut seluruh bangsa ini. Satu komoditas kecil menjelang Ramadhan anjlog harganya, ribut seluruh bangsa ini, satu Pak. Tadi Bapak bilang IPM ini kan juga baru naik ini Pak, tertatih-tatih naik. Provinsi ini ada 34, waktu itu IPM Maluku Utara ini 336 Bapak bisa bayangkan provinsinya Cuma 34, IPMnya urutan ke 36....(suara tidak jelas) Setelah Bapak ini Pak Bapak tua yang ada disana kita soning terus sekarang kalau tidak salah urutan ke 23 dari 34 provinsi IPM Maluku Utara, itu satu. Saya lihat disini ada satu statement Bapak tapi kita berseberangan Pak. Menurut saya nanti ini Bapak juga kaji lagi bahwa metodologi pengukuran kemiskinan ini sudah kadaluwarsa atau kurang-lebih 20 tahun Pak. Undang-undang ini dicetuskan tahun sembilan puluh delapan berarti sudah dua puluh tahun, tidak relevan lagi. Dan ini ditentang para ekonom, bahwa ukuran kemiskinan ngga relevan lagi. Perlu ada pemikiran dari Bapak untuk direvisi dengan memasukan berbagai disiplin ilmu. Pak ini tambahan saja Pak ya tadi soal indeks kebahagiaan tadi. Kita pernah belajar di Estonia, satu negara kecil di Finlandia, negara yang indeks kemiskinannya tertinggi di dunia, seluruhnya free, termasuk penganggur juga aman saja, begitu Pak. Kita punya Aborogin di Australia itu jauh dibawah Pak. Jadi ini kan perlu ada korelasi Pak antara indeks kebahagiaan dengan pengangguran kemiskinan yang semakin .... Tidak usah jauh-jauh Pak, Kopra harga turun saja ribut seluruh bangsa.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ya saya kira nanti kita bahas di FGD Pak ya. Silakan dari Kepala LKPP.

**KEPALA LKPP:**

**Terima kasih Pimpinan.**

**Bapak Ibu Anggota Komisi XI yang kami hormati.**

Paling tidak pertama PR kami memperkenalkan lembaga LKPP Pak, yang sudah 12 tahun mungkin kurang dikenal Bu Elvi juga. LKPP ini lembaga apa, kata Pak Haerul tadi lembaga kurang publikasi dan publisitas. Lembaga kebijakan mengenai barang jasa pemerintah.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Pak tadi saya ke Pak Heri apa itu kepanjangan LKPP ini, ngga tahu yang ngga tahu itu Pak Heri Pak.

**KEPALA LKPP:**

Ngga tahu Pak Heri. Kami memang harus, harus berkomunikasi dengan Bapak Ibu terhormat di DPR bukan hanya untuk masalah urusan anggaran tapi ada beberapa hal yang memang kami harus sampaikan. Pertanyaan Bu Evi tadi ke kementerian lembaga ke pemerintah daerah kami selalu sosialisasikan, termasuk kewajiban kami terkait dengan Stranas. Tindak pidana korupsi kami

punya kewajiban untuk membuat katalog sektoral di sepuluh kementerian lembaga, saat ini dari sembilan di tahun 2019 ini dan 20 provinsi kabupaten kota. *Alhamdulillah* sudah 13 provinsi kabupaten/kota. Jambi kami masih menyoar daerah dan KL besar dan daerah yang potensi proses pengadaannya banyak terjadi tindak pidana korupsi. Ada beberapa hal yang harus di kami lakukan dengan kepala daerah melakukan katalog sektor lokal, karena kita mengenai katalog nasional saya kira lokal Bapak Ibu yang terhormat. Pada saat pengadaan komputer kan tidak mungkin kami serahkan pada sektoral kami harus tarik itu kepada katalog nasional. Expander mungkin nanti Ibu Tutik bisa lihat, oh itu jangan-jangan pembeliannya melalui katalog. Sementara dana desa sebagaimana Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 tahun 2015 dimana diatur dalam PP 60 tahun 2014, ditindaklanjuti dengan PP dana desa terbaru bahwa penggunaan dana desa, proses pengadaannya diatur oleh bupati dan walikota. Sehingga kami LKPP membantu pendampingan kepada bupati walikota dalam rangka penyusunan peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Dan bulan April kemarin kami pergi ke NTT Pak ke Tambulaka, ke Sumba Barat Daya untuk melakukan semacam sosialisasi. Sehingga LKPP terkait dengan dana desa memang tidak langsung terkait dengan dana desanya tetapi terkait dengan bagaimana penyusunan pengadaan dana desa tidak terlepas dari Perpres 16 karena yang diatur dalam Perpres 16 adalah APBN dan APBD.

APBD des tidak masuk dalam bagian tetapi diatur dalam peraturan PP yang mengatur tentang penggunaan dana desa. Kemudian yang terkait dengan proses yang disampaikan Pak John tadi memang kami cukup strategis tapi kami juga harus koordinasi dengan BPK dan BPKP, karena BPKP ini melakukan pendampingan kami juga tidak secara langsung dalam proses pengadaannya memang tetapi bagaimana membantu proses yang ada di LKPP dalam melakukan tugasnya. Dan itu dilakukan BPKP dan selalu ada masukan kepada kami terkait dengan SOP, bagaimana management resiko. Dan BPK juga dari hasil-hasil pemeriksaan laporan keuangan maupun dari hasil pemeriksaan kinerja kami banyak mendapatkan masukan harus segera melakukan perbaikan. Sehingga memang LKPP menjadi bagian yang saat ini diminta Presiden untuk tidak menjadi penghambat. Karena ada informasi bahwa pengadaan itu menjadi penghambat pencapaian proses pembangunan karena terlalu banyak aturannya sehingga kami banyak melakukan inovasi, ada tender cepat, ada proses yang bisa langsung kita melalui katalog. Dan katalog-katalog ini akan kita dorong untuk semakin banyak komoditas yang masuk.

Saya kira itu Bapak Pimpinan yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf apabila dalam paparan kami tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik saya kira cukup ya, kita sudah mendengarkan jawaban dan juga pendalaman tadi yang bahkan ditambah dengan beberapa interupsi, segera kita masuk ke sesi ketiga yaitu kesimpulan atas keputusan hasil rapat kita saya kira bisa ditayangkan. Baik saya bacakan ya, mohon nanti ditambah-kurangkan jika ada yang salah.

Kesimpulan keputusan:

1. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Sekretariat Jenderal BPK RI dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2020 setelah pergeseran antara program sebesar Rp.3.337.736.904.000,-. Dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut, yaitu satu program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya Rp.617.328.710.000,-. Dua, program pemeriksaan keuangan negara Rp.2.720.408.194.000,- dengan total Rp.3,337.736.904.000,-. Bagaimana dengan BPK apakah setuju dengan kesimpulan ini.

**F-NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Pak Sekjen saya saja yang ...(suara tidak jelas)

**KETUA RAPAT:**

Oh dua ya, baik, baik kita masuk kedua ya, karena ini satu paket, baik. Baik serahkan ke Sekjen BPK silakan.

**SEKJEN BPK RI:**

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi XI. Pertama masukan saya yang tadi Pak yang itu ngga pakai tadi ribuan yang tadi koreksi sekarang, dalam rupiah, karena itu total angka sehingga rupiah. Ya sudah, sudah dikoreksi tadi ribuan rupiah jadi anggaran BPK bisa tiga ribu triliun nanti. Terus yang kedua setuju yang tadi supaya untuk me apa namanya memberikan fokus bahwa tambahan ini diantaranya atau terutama untuk pemeriksaan, untuk menyelesaikan 3.400 karena ada yang lain. Tapi terutama untuk, tambah kata-kata terutama mohon ijin Pimpinan. Terutama ya.

**F-NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Ketua, kalau untuk meyakinkan lagi, ini kita baru kemarin memilih Ketua Banggar yang baru, baru kemarin. Tadi saya berjumpa dengan beliau rapat tapi tertunda karena kurang satu ketua. Kalau mau terperinci lagi *breakdown* Pak Ketua saya sarankan 3.461 LHP dirinci audit finance berapa, audit kinerjanya berapa, audit dengan tujuan tertentu berapa, supaya lebih jelas konkretnya breakdownnya, untuk meyakinkan Ketua Banggar. Jadi ditambah Pak Pimpinan ijin terdiri dari 195 LHP kinerja, tulis komendan di belakang. 195 LHP kinerja, 372 LHP DTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan 2.894 LHP ban Parpol, terperinci Pak Sekjen, untuk yakinkan data di Banggar. Jadi jangan dipikir oh ini karang-karang. Itu Pak Pimpinan minta maaf tambahan dari saya.

Terima kasih Pak. Kalau disetujui, kalau tidak disetujui drop saja.

**KETUA RAPAT:**

Baik, setuju ya Pak Sekjen. Baik kita setuju ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

Kita masuk point ketiga yaitu terkait dengan BPS.

Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif BPS termasuk usulan pergeseran anggaran antar program dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2020 sebesar Rp.7.928.793.567.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Program dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS sebesar Rp.2.963.270.370.000,-.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPS sebesar Rp.4.965.523.197.000,- dengan total Rp.7.928.793.567.000,-.

Bagaimana dengan Pak Kepala BPS apakah sudah sesuai, silakan.

**KEPAPLA BPS:**

Sudah sesuai Bapak, setuju terima kasih atas dukungannya.

**KETUA RAPAT:**

Baik, baik kita ketok ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

Yang keempat, Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif BPKP dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2020 sebesar Rp.1.853.668.834.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Program dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP sebesar Rp.1.446.061.096.000,- dan
2. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan SIP sebesar Rp.407.607.738.000,- dengan total Rp.1.853.668.834.000,-.

Kami tanyakan kepada BPKP apakah sudah sesuai dan setuju dengan keputusan ini? Silakan.

**KEPALA LKPP:**

Sesuai Pimpinan, setuju terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Yang lain setuju? Pak Hatari, sudah cocok? Oke ya, kita ketok, baik. Bagaimana BPKP?

**KEPALA BPKP:**

Nda ada Pak.

**KETUA RAPAT:**

Tidak ada. Baik.

**(RAPAT : SETUJU)**

Lima, LKPP ya. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif LKPP dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2020 sebesar Rp.169.675.434.000,- dan pergeseran antar program dengan rincian sebagai berikut:

1. Program dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp.80.764.804.000,-
2. Program pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sebesar Rp.88.910.630.000,- dengan total Rp.169.675.434.000,-.

Kemudian yang keenam, Komisi XI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran LKPP dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2020 sebesar Rp.116.707.032.000,- yang akan digunakan untuk:

- a. Program dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya LKPP sebesar Rp.38.400.818.000,- dan
- b. Program pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sebesar Rp.78.306.214.000,-

Apakah ini sudah cocok dan setuju LKPP?

**KEPALA LKPP:**

Terima kasih Pimpinan. Ijin nomor lima, Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif LKPP dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2020 sebesar Rp.169.675.434.000,- dengan rincian, tidak ada kalimat dan pergeseran antar program. Dengan rincian berdasarkan program sebagai berikut, siap.

**KETUA RAPAT:**

Coba dihapus.

**KEPALA LKPP:**

Sudah Bapak.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**KEPALA LKPP:**

Terima kasih atas persetujuan ...(suara tidak jelas) Anggota DPR.

**KETUA RAPAT:**

Yang lain?

**KEPALA LKPP:**

Yang lainnya kami setuju.

**KETUA RAPAT:**

Baik, kita ketok ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

Baik dengan demikian kita telah merumuskan kesimpulan kita terhadap empat lembaga ini, ya. Setelah dari Banggar kita akan bahas kembali dan nanti atas kesepakatan Poksi-Poksi kita bisa adakan konsinyering.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan. Biasanya kan kita bunyikan di kesimpulan ini bahwa kita akan melakukan pendalaman terhadap keputusan hari ini.

**KETUA RAPAT:**

Ya saya barusan lihat yang tahun lalu ngga dimasukan didalam point ini.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Lalu apa yang mengikat kita bahwa nanti akan kita tindaklanjuti.

**KETUA RAPAT:**

Baik, silakan yang lain ada masukan, Pak Refrizal silakan.

**F-PKS (H. REFRIZAL):**

Ini kemarin memang kita agak panjang dengan Menteri Keuangan yang masalah pemotongan anggaran ini ya, agak panjang kemarin termasuk kita skors rapat kita. Tapi intinya dari Menteri Keuangan semua akan dipenuhi yang prioritas untuk dikerjain. Tapi kan ini harus selesai sebelum kita reses, ya sebelum kita reses karena apa sebelum reses, tanggal 16 Agustus sudah dibacakan nota keuangan oleh Pidato Nota Keuangan dihadapan DPR oleh Presiden. Jadi sebelum reses ini sudah harus kita bahas penambahan persetujuan anggaran ini, kalau ngga lewat. Nanti dia tidak akan masuk Pidato Presiden Nota Keuangan tahun 2020, ini harus komitmennya itu, yang harus kita bicarakan itu, penambahannya ini. Kalau ngga percuma saja jadi



kesimpulan doang, ngga ada konsen waktunya begitu. Karena ada anggarannya ada batasan waktu ini Pak, ...(suara tidak jelas) waktu ngga bisa kita lewatkan begitu saja gitu. Nanti mungkin tolong diatur oleh Pimpinan nanti kapan kita membahas ini termasuk bila perlu mengundang Menteri Keuangan, Bappenas untuk penambahan anggaran yang tadi kita setuju dalam kesimpulan.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, biasanya kan kita setelah dibahas di Banggar kemudian dibacakan di Paripurna 16 Agustus setelah itu baru kita melakukan pendalaman terhadap RKAKL sebagai bukan indikatif lagi. Jadi memang pagu yang akan kita tetapkan, biasanya setelah itu. Nda nda perlu, disini kan nanti langsung Banggar, habis ini kita reses langsung paripurna, ngga ngejar nanti waktunya. Saya kira demikian ya.

#### **F-NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Baik Pimpinan, kalau belum ditutup ada satu menit untuk memberi garanti kepada Menteri Keuangan, Ketua Banggar dan terutama Pimpinan Banggar. Kenapa saya sampaikan ini, positioning Anggota Komisi XI di Banggar ngga banyak, Cuma satu orang saja. Ini sekali lagi, positioning Anggota Komisi XI di Banggar satu orang. Dan kalau tadi BPKP kita mempergunakan alasan yang rasional tidak ada salahnya kalau BPKP juga kita memberikan alasan yang sama. Bukan terbatas kepada program saja tetapi kegiatan dari program itu apa saja untuk meyakinkan Banggar. Pengalaman lima tahun dengan Banggar dan Komisi XI. Apa-apa yang kita sepakati disini belum tentu disana bisa disilet, kalau alasan kitanya tidak rasional. Dan karena itu Pimpinan saya menyarankan dari tenaga ahli khususnya program management dari BPKP itu harus dibreakdownnya kegiatan. Kalau tidak lima cukup tiga. Penyelesaian pembangunan gedung kantor perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Bangka Belitung. Tahap pertama gedung kantor perwakilan BPKP Kalimantan Tengah dan Maluku Utara. Ini menjadi alasan pertimbangan, nanti kita bergainig dengan Pimpinan Banggar.

Pembangunan dua unit rumah negara type A eselon satu. Masa eselon satu BPKP kok tinggalnya di Pos Polisi, mana ada. Jadi maunya saya, saya bisa fating dengan data ini. Kalau tanpa ini susah Pak. Pembangunan 35 unit rumah negara type B, C, D di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo dan Papua Barat, itu Pak. Terutama ini yang terakhir Papua Barat, mau bangun rumah atau merdeka, itu saja alasan klasik. Itu Pak, kemarin ramai Kapolda baru saja hampir seluruh rakyatnya keluar menolak, karena mereka mendasari Undang-Undang 21 tahun 2001 bahwa siapapun jadi Kapolda di tanah Papua, siapapun jadi Kajati di tanah Papua harus ada rekomendasi dari gubernur. Untung bisa diatasi Pak, itu soalnya. Jadi kalau komandan memperkenankan menurut saya breakdown itu memperkuat alasan untuk positioning di Banggar. Tapi kalau Bapak merasa keberatan juga tidak apa-apa.

**KETUA RAPAT:**

Ngga, nanti kan dibacakan kembali mereka di Banggar Pak. Saya kira tidak akan terlepas dari dokumen yang melampirinya. Atau BPKP merasa perlu menambahkan.

**KEPALA BPKP:**

Dalam pandangan kami Bapak Pimpinan dan Pak Hatari sebetulnya ini usulan yang rutin boleh dibilang Pak. Walaupun isinya ada tambahan untuk pembangunan gedung baru yang setelah tiga tahun tidak pernah masuk itu Pak. Jadi apabila diijinkan barangkali cukup seperti ini tapi nanti penjelasan tambahannya akan dilengkapi sesuai dengan proses berikutnya. Barangkali itu Pak.

**KETUA RAPAT:**

Baik, saya kira sudah cukup ya nanti kita tinggal jelaskan di Badan Anggaran.

**F-NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Kalau Bapak keberatan, kita akan mempergunakan PMK 611 tahun 2018. Bapak pilih mana?. Kalau Bapak keberatan yang tadi saya sampaikan maka PMK 611 tahun 2018 tentang larangan rehabilitasi Kantor Bappenas kita akan pakai itu untuk BPKP.

**KEPALA BPKP:**

Pemahaman kami, kami bukannya keberatan. Di pemahaman kami ini adalah proses usulan yang rutin yang apa namanya kami merasa perlu untuk melakukan pembangunan yang selama ini tidak pernah mendapatkan alokasi. Namun demikian apabila memang untuk dapat menguatkan usulan di Badan Anggaran barangkali kami mengikuti saja Pak. Yang penting buat kami, kami bisa mendapatkan alokasinya, sehingga teman-teman di Papua Barat, kemudian di Maluku Utara itu semua mempunyai kantor yang layak sehingga apa namanya bisa memberikan pelayanan kepada stakeholder. Karena selama ini terus-terang kami kemarin ke Papua Barat memang menyedihkan Pak, kami mendapatkan tugas yang cukup berat tanpa sebetulnya dukungan fasilitas untuk pelaksanaan tugas berupa kantor itu yang betul-betul memadai. Ini teman-teman melakukan kerja itu didalam katakanlah menggunakan meja atau bangku-bangku yang ngga ada bedanya dengan warung kopi disini Pak terus-terang. Jadi kami sebetulnya sangat memerlukan dukungan Bapak dan Ibu sekalian Komisi XI untuk bisa mewujudkan Kantor BPKP di tempat-tempat yang kami usulkan. Kami apa namanya menyerahkan saja Pak bagaimana baiknya yang penting buat kami bisa terwujud. Barangkali demikian Pak.

**KETUA RAPAT:**

Baik, jadi Pak Hatari menurut beliau dia ikut saja, tapi kalau kita mau itu dimasukan ya saya kembalikan kepada Anggota. Silakan mau dimasukan bisa.

**F-NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Ini kan kesimpulan politik. Kalau kita reseningkan disini dan positioning kita disana, ini kan berjuang, kan begitu Pak. Kita diharamkan masuk saja kan begitu. Tidak diharamkan masuk saja, karena kita mempergunakan bansmark. Beli anjing saja tiga triliun koma tujuh. Beli anjing dari bea cukai, apalagi ketambahan Cuma sekian, ini dikeberatan. Nanti kita bicara loh Pak, vulgar ada 13 Satker kalau dibuka lima puluh milyar lima puluh milyar tertutup ini semua, kenapa tidak. Ini kan coba dulu Pak, memang Pak Hafisz ini saya tahu betul ini beliau ini memang itu orang lurus, alim ini beliau tidak mau terlalu itu, begitu. Malah saya kadang-kadang mendekati beliau, Pak pengawasan dana desa ini Bapak punya dana terlalu kecil, tapi beliau bilang ya biar saja ini beliau.

**KETUA RAPAT:**

Baik, kita tambahkan saja ya disitu ya biar Pak Hatari bisa kawal nanti di Banggar, silakan.

**F-NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

...(suara tidak jelas) kemitraan Pak Ketua Pak Hafisz yang terhormat sebab di Banggar bukan hanya Komisi XI yang bergaining dengan mitranya. Ada sebelas komisi, begitu. Masing-masing dengan argumentatifnya mempertahankan mitranya. Loh kita Cuma satu ini saja loh kemarin. Itu yang dua tahun lalu Wakil Presiden Yusuf Kalla sangat-sangat tidak menyetujui BPK membangun kantor arsip di Sulawesi Selatan, hanya dengan alasan moratorium. Dengan berbagai pendekatan kita lakukan surat lagi akhirnya kantor arsip, begitu Pak Sekjen, kantor arsip di Sulawesi Utara, kantor arsip di program yang baru yang masih prematur Kalimantan Utara sudah ada kantor arsip. Ini rahasia negara disimpan, ngga bisa disimpan di pos-pos kecil. Jadi menurut saya Pak Hafisz tidak diharamkan kalau mau ditaruh, tapi kalau Kepala BPKP sangat keberatan juga ngga ada masalah kok Pak, begitu.

Terima kasih Pak, ini kan pendekatan kemitraan kita merasa memiliki ini mitra kita ini Pak. Kalau capaian kinerja yang militansi apa kita tidak bangga, begitu Pak.

**KETUA RAPAT:**

Baik, saya bacakan lagi tambahannya adalah program dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP (termasuk penyelesaian pembangunan gedung kantor perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Bangka Belitung, pembangunan tahap pertama gedung kantor perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dan Maluku Utara, pembangunan 2 unit rumah negara type A eselon satu, pembangunan 35 unit

rumah negara type B/C/D di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo dan Papua Barat). Demikian tambahan untuk point nomor satu dari pagu indikatif BPKP. Bagaimana Pak Kepala?

**KEPALA BPKP:**

Setuju Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ya baik.

**(RAPAT : SETUJU)**

Baik Saudara sekalian dengan demikian kita telah menyelesaikan semua usulan teknis dari RKAKL empat lembaga mitra kerja yaitu BPK RI, BPKP, LKPP dan BPS. Sebagai kata penutup kami persilakan kepada Sekjen BPK untuk mewakili empat lembaga ini sekaligus kita mengakhiri acara kita memberikan closing statement. Waktu dan tempat kami persilakan.

**SEKJEN BPK RI:**

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi XI, dan mohon ijin Kepala BPS, Kepala BPKP dan Kepala LKPP mewakili menyampaikan tanggapan akhir kata penutup dalam rapat dengar pendapat pembahasan pendahuluan pagu indikatif tahun 2020 dari BPK kemudian BPS, BPKP dan LKPP. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI dan tadi telah menyetujui usulan-usulan yang telah kami sampaikan. Dan mohon maaf apabila dalam pembahasan ini ada yang kurang berkenan.

Demikian barangkali sambutan kami terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI DPR RI kami mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirnya dengan mengucap syukur *Alkhamdulillah* rapat ini kita tutup, *Nasrun minallah wafatun korib.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.50 WIB)**

**Jakarta, 19 Juni 2019**

**a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat**

**Ttd**

**Drs. Urip Soedjarwono  
NIP. 19620521 198203 1 001**

